



**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun:

RIZKA UTAMI INDRA

14020119120031

**PROGRAM STUDI S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel./Faks. (024) 74605407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Rizka Utami Indra
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14020119120031
3. Tempat / Tanggal Lahir : Padang Panjang, 15 Juli 2001
4. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik/ S-1 Administrasi Publik
5. Alamat : Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sikek, Kec.X Koto, Kab.
Tanah Datar. Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :
Analisis Peran *Stakeholder* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20 %.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 13 September 2023

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Retna Hanani, S.Sos., MPP

Pembuat Pernyataan,

Rizka Utami Indra

Ketua PS S1 Administrasi Publik

Dra. Maesaroh, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan
Bencana Banjir di Kota Semarang
Nama Penyusun : Rizka Utami Indra
Nim : 14020119120031
Program Studi : Administrasi Publik

Semarang, 14 September 2023

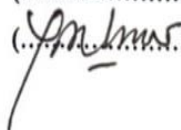
Dekan

Wakil Dekan I

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin.
NIP. 196408271990011001 NIP. 196908221994031003

Dosen Pembimbing:

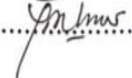
1. Retna Hanani, S.Sos., MPP
2. Dr. Kismartini, M.Si


(.....)

(.....)

Dosen Penguji:

1. Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA
2. Retna Hanani, S.Sos., MPP
3. Dr. Kismartini, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN MOTTO

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat”

(Q.S Al-Baqarah: 45)

“Surround yourself with good people, cause you’re a good person too”

(Mark lee)

“Hiduik Baraka Mati ba iman”

HALAMAN PESEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kesuksesan penulisan skripsi ini, khususnya untuk:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan do'a yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang tiada henti.
3. Dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Retna Hanani, S.Sos., MPP dan Dr. Kismartini, M.Si yang telah membimbing dan mengarahkan untuk kelancaran pengerjaan skripsi.
4. Almh. Nenek Nurmalia yang selama hidupnya telah mencurahkan kasih sayang dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Uni dan Mas adit yang memberikan dukungan dan selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan.
6. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi selama pengerjaan skripsi.
7. Keluarga Administrasi Publik angkatan 2019 dan teman-teman yang mendukung dan membantu selama proses penyusunan skripsi.

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Semarang. Bencana Banjir tersebut terjadi karena faktor meteorologi, topografi, penggunaan lahan, dan permasalahan sistem drainase. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir memberikan pengaruh negatif pada aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik dari aspek: fisik, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam upaya meminimalisir terjadinya bencana banjir, maka dibutuhkan keterlibatan dari *stakeholders*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi pustaka. Informan pada penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang merupakan *stakeholders* kunci. Kemudian Warga Kelurahan Tanjung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan *stakeholders* primer. Selanjutnya, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dan Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas merupakan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* tersebut melaksanakan peran *stakeholders* yang dianalisis menurut teori Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018), yaitu : *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*. Setiap *stakeholders* melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun faktor pendukung peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu: nilai, kepercayaan, dan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat peran *stakeholders* terdapat pada permasalahan komunikasi. Saran yang dapat diberikan adalah *stakeholders* utama dalam koordinasi perlu meningkatkan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir.

Kata Kunci: Bencana banjir, Peran *stakeholders*, Kota Semarang

ANALYSIS OF THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT IN SEMARANG CITY

ABSTRACTS

Floods are one of the disasters that often occur in Semarang City. The flood disaster occurred due to meteorological, topographic, land use, and drainage system problems. The impact caused by floods has a negative influence on aspects of people's lives and livelihoods, both in terms of: physical, social, economic, and health. In an effort to minimize the occurrence of flood disasters, involvement from stakeholders is needed. This study aims to analyze the role of stakeholders in flood disaster management efforts and analyze the supporting and inhibiting factors of stakeholders' role in flood disaster management in Semarang City. This research uses qualitative descriptive methods with collection techniques through interviews and literature studies. Informants in the study were selected by purposive sampling techniques. The results showed that the Semarang City Regional Disaster Management Agency is a key stakeholder. Then the residents of Tanjung Mas Village and the Semarang City Public Works Office are the primary stakeholders. Furthermore, the Semarang City Spatial Planning Office, Pemali Juana River Basin Center, and Tanjung Mas Village Government are secondary stakeholders. These stakeholders carry out the role of stakeholders analyzed according to Nugroho's theory in (Setiawan et al., 2018), namely: policy creator, coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. Each stakeholder carries out its role in accordance with their respective duties and functions. These stakeholders carry out the role of stakeholders analyzed according to Nugroho's theory in (Setiawan et al., 2018), namely: policy creator, coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. Each stakeholder carries out its role in accordance with their respective duties and functions. The supporting factors for the role of stakeholders in flood disaster management, namely: values, beliefs, and policies. While the inhibiting factor of the role of stakeholders is found in communication problems. The suggestion that can be given is that the main stakeholders in coordination need to improve communication so that there is no misinterpretation in providing information involved in flood disaster management.

Keywords: Flood disaster, Role of stakeholders, Semarang City

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, semangat dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dra. Tri Yuningsih,, M.Si selaku Ketua Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
4. Ibu Retna Hanani, S.Sos., MPP dan Ibu Dr. Kismartini, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberi arahan serta memberikan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hartuti Purnaweni MPA selaku dosen penguji dan dosen wali yang telah membimbing saya dan memberikan masukan untuk penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan Do'a dan motivasi baik secara moril dan materil.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Administrasi Publik 2019 FISIP UNDIP.
9. Terima kasih kepada teman terbaik saya Aisyah Annis Rahmawati yang senantiasa memberikan bantuan dan telah mendukung dalam suka maupun duka.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Raihan, Novia, Syerina, Afitrah, Sabrina, Anisa, Nesa, Zaki, Rangga, dan Arif.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 September 2023
Penulis

Rizka Utami Indra
NIM. 14020119120031

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI).....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I (PEMBAHASAN)

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Penelitian Teoritis	11
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	11
1.5.2 Administrasi Publik.....	17
1.5.3 Kebijakan Publik.....	21
1.5.4 Analisis Peran <i>Stakeholders</i>	25
1.5.5 Penanggulangan Bencana	29
1.5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i>	33
1.5.7 Kerangka Berpikir	37
1.6. Operasionalisasi Konsep	38
1.7. Argumen penelitian.....	42
1.8. Metode Penelitian	43
1.8.1 Tipe Penelitian	43

1.8.2 Situs Penelitian.....	43
1.8.3 Subjek Penelitian.....	44
1.8.4 Jenis Data dan Sumber Data	45
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data	49
1.8.7 Kualitas Data.....	50
 BAB II (GAMBARAN UMUM)	
2.1. Gambaran Umum Kota Semarang	52
2.1.1 Kondisi Geografis	52
2.1.2. Kondisi Demografi	54
2.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	56
2.2.1 Visi dan Misi.....	56
2.2.2 Tugas dan Fungsi	57
2.3. Gambaran Umum Banjir di Kota Semarang.....	64
 BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)	
3.1. Identifikasi <i>Stakeholders</i>	68
3.1.1 <i>Stakeholders</i> Primer	69
3.1.2 <i>Stakeholders</i> Kunci	71
3.1.3 <i>Stakeholders</i> Sekunder	75
3.2. Peran <i>Stakeholders</i> dalam Penanggulangan Bencana Banjir	80
3.2.1 <i>Policy Creator</i>	81
3.2.2 Koordinator	83
3.2.3 Fasilitator	87
3.2.4 Implementator	92
3.2.5 Akselerator.....	98
3.3. Faktor pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i> dalam Penanggulangan Bencana Banjir.....	108
3.3.1 Faktor Pendukung	108
3.3.2 Faktor Penghambat.....	111
 BAB IV (PENUTUP)	
4.1. Kesimpulan.....	113
41 Identifikasi <i>Stakeholders</i> dalam Penanggulangan Bencana Banjir	113
42 Peran <i>Stakeholders</i> dalam Penanggulangan Bencana Banjir.....	114

43	Faktor Pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i> dalam Penanggulangan Bencana Banjir	118
4.2.	Saran.....	119
	Daftar Pustaka.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kejadian Banjir Rob Tahun 2022.....	2
Tabel 1.2. Data Saluran Drainase	3
Tabel 1.3. Profil Informan.....	44
Tabel 1.4. Matriks Teknik Pengumpulan Data.....	48
Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Semarang.....	53
Tabel 2.2. Data daerah terdampak banjir Tahun 2022.....	55
Tabel 2.3 Data Bencana Banjir Tahun 2015-2022	65
Tabel 3.1. Profil Informan.....	68
Tabel 3.2. Hasil Analisis Peran <i>Stakeholders</i>	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Luas dan batas Wilayah Administrasi Kota Semarang.....	53
Gambar 2.2. Peta persebaran curah hujan	56
Gambar 2.3. Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang	59
Gambar 3.1. Kegiatan Drainase.....	74
Gambar 3.2. Penyerahan paket sembako	79
Gambar 3.3 Monitoring dan Evaluasi FPRB.....	85
Gambar 3.4. Infrastruktur Rumah Pompa Sringin.....	88
Gambar 3.5. Pemberian Air Bersih.....	89
Gambar 3.6 Sosialisasi Kesiapsiagaan.....	93
Gambar 3.7. Penanganan Tepra terkait Pembersihan Sampah.....	94
Gambar 3.8. Bantuan Masyarakat Tangguh Bencana.....	95
Gambar 3.9. Pengendalian Banjir dan Rob Kawasan Tambaklorok	96
Gambar 3.10. Aplikasi SiPantau.....	99
Gambar 3.11. Peta Ancaman Banjir di Kota Semarang.....	100
Gambar 3.12. Bagan Hubungan Antar <i>Stakeholders</i>	102

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Panduan Wawancara	127
Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara.....	129
Lampiran 3. Hasil Dokumentasi.....	142
Lampiran4. Surat Penelitian	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana alam berupa banjir sering terjadi di Indonesia. Hal ini mengacu pada data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022), di mana banjir terjadi sebanyak 1.531 kejadian sepanjang tahun 2022. Banjir tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: faktor meteorologi, topografi, penggunaan lahan, dan tipe tanah (Kharimah et al., 2021). Bencana banjir memiliki beragam resiko yang memberikan dampak negatife pada berbagai sektor. Bencana banjir ini dapat menyebabkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan tersebut dapat diukur dari segi kerusakan langsung seperti: hilangnya nyawa, cedera, kehancuran infrastruktur, kendaraan dan kerusakan tanaman dan hewan. Kemudian kerusakan tidak langsung mengacu pada gangguan sosial, trauma psikologis dan pola produksi dan konsumsi barang yang terganggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan pada bencana banjir.

Kota Semarang adalah salah satu daerah yang sering mengalami bencana banjir. Adapun wilayah yang sering mengalami banjir di Kota Semarang, yaitu seperti: daerah Muktiharjo kidul, Tambakrejo, Mangkang wetan, Mangunharjo, Wonosari, Tanjungmas, dan sebagainya. Menurut data dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, bencana banjir terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Bencana Banjir di Kota Semarang Tahun 2015-2022

No.	Tahun	Jumlah Kejadian
1.	2015	48
2.	2016	30
3.	2017	36
4.	2018	34
5.	2019	18
6.	2020	23
7.	2021	88
8.	2022	63

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa banjir terjadi setiap tahunnya di Kota Semarang. Banjir tersebut masih terus berlanjut hingga Maret 2023, dengan total 18 kejadian bencana banjir di Kota Semarang. Kemudian banjir di Kota Semarang juga disebabkan oleh permasalahan sistem drainase yaitu ketika saluran dipenuhi oleh tanaman liar, sampah, dan sedimentasi. Hal tersebut dapat menyebabkan penyumbatan dan membuat air meluap, sehingga menimbulkan banjir. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, masih terdapat 101 saluran drainase yang bermasalah, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Data Saluran Drainase

Saluran Kondisi Buruk [101 Saluran]	10. Sub Sistem Kali Bulu (Sistem Semarang Tengah) [2 Saluran]
1. Bandara A. Yani (Sistem Semarang Barat) [0 Saluran]	11. Sub Sistem Kali Mangkang (Sistem Mangkang) [4 Saluran]
2. Sub Sistem Bandarharjo (Sistem Semarang Tengah) [18 Saluran]	12. Sub Sistem Kali Pedurangan (Sistem Semarang Timur) [3 Saluran]
3. Sub Sistem BKB (Sistem Semarang Tengah) [20 Saluran]	13. Sub Sistem Kali Semarang (Sistem Semarang Tengah) [2 Saluran]
4. Sub Sistem BKT (Sistem Semarang Timur) [4 Saluran]	14. Sub Sistem Kali Siangker (Sistem Semarang Barat) [15 Saluran]
5. Sub Sistem Kali Asin (Sistem Semarang Tengah) [14 Saluran]	15. Sub Sistem Kali Silandak (Sistem Semarang Barat) [6 Saluran]
6. Sub Sistem Kali Babon (Sistem Semarang Timur) [1 Saluran]	16. Sub Sistem Kali Sringin (Sistem Semarang Timur) [3 Saluran]
7. Sub Sistem Kali Banger (Sistem Semarang Tengah) [0 Saluran]	17. Sub Sistem Kali Tenggang (Sistem Semarang Timur) [0 Saluran]
8. Sub Sistem Kali Baru (Sistem Semarang Tengah) [1 Saluran]	18. Sub Sistem Kali Tugurejo (Sistem Semarang Barat) [4 Saluran]
9. Sub Sistem Kali Bringin (Sistem Mangkang) [4 Saluran]	19. Sub Sistem Simpang Lima (Sistem Semarang Tengah) [0 Saluran]

Sumber: DPU (2022)

Pemerintah menyadari urgensi kebijakan untuk penanggulangan banjir sebagai respon terhadap tingginya risiko banjir di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian agar penanggulangan bencana berjalan secara terpadu dan terkoordinasi secara menyeluruh maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Selain itu, penanggulangan bencana juga menjadi salah satu agenda dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan pemerintah Kota Semarang dalam program penanggulangan baik secara struktur dan non struktur.

Secara struktur, upaya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah seperti: normalisasi banjir kanal timur dan barat, pemasangan polder, pembangunan waduk, dan peninggian jalan. Sedangkan upaya penanggulangan secara non struktural yang dilakukan pemerintah, yaitu: pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi di DAS, dan pengembangan *Early Warning System* (EWS). EWS merupakan sistem peringatan dini, sehingga banjir dapat diantisipasi (Kurniawati & Suwandono, 2015).

Namun, penelitian terdahulu tentang mitigasi bencana sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana di Kota Semarang, menjelaskan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir belum maksimal (Permanahadi, 2022). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dari 19 indikator mitigasi bencana, Kota Semarang baru menerapkan 52,6% atau 10 indikator. Kemudian (Mahardika, 2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Semarang mulai dari pra bencana, terjadinya bencana, dan pasca bencana masih memiliki kekurangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Syafri, 2018) ditemukan bahwa kualitas layanan BPBD masih belum maksimal, karena masih terdapat keluhan dari masyarakat. Selain itu, berdasarkan pengakuan salah satu warga Kelurahan Siwalan, menyebutkan bahwa saluran air di sekitar tempat tinggalnya terlalu sempit, sehingga air tidak semuanya bisa tertampung di saluran air (www.kompas.id, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem drainase belum cukup baik.

Bencana banjir memiliki permasalahan kompleks dan multidimensi, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan peran dan tanggung jawab masing-masing (Nur, 2022). Adapun *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir di kota Semarang yaitu institusi pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun demikian, di Kota Semarang kesepahaman antar *stakeholders* belum ada. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Kemudian berdasarkan *preliminary research*, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Semarang bahwa penanggulangan bencana banjir belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar unit pelaksana, normalisasi sungai belum 100% dan anggaran yang terbatas.

Lembaga pemerintahan merupakan *leading* sektor yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, rencana, dan program untuk penanggulangan banjir (Masyhuri et al. 2021). Pemerintah juga harus tangguh sehingga mampu untuk mengelola setiap bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, *leading* sektor memiliki tiga fungsi dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu: fungsi koordinasi, pelaksana dan komando (Awalia, 2015). Leading sektor dalam penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian ditingkat daerah

menurut Heryati (2020) lembaga pemerintah non-departemen ini disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan *preliminary research* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, *stakeholders* dalam pelaksanaan penanggulangan banjir dilakukan oleh: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Setiap instansi memiliki kepentingan tersendiri sehingga sering terjadi benturan kepentingan, sulitnya komunikasi dan koordinasi. Hal tersebut menyebabkan belum adanya kesepahaman antar *stakeholders* untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana.

Selain *stakeholders* dari pemerintah terdapat *stakeholders* dari komunitas, yaitu Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Kelurahan Siaga Bencana (KSB) meliputi 64 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Pelaksanaan KSB merupakan tanggung jawab masing-masing kecamatan, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya bertugas untuk mengawal program tersebut. Kelompok ini dapat dilibatkan dalam pengendalian banjir dengan berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat dan mampu mengorganisir sumber daya manusia untuk mengurangi kerentanan resiko bencana banjir. Namun, dalam pelaksanaanya KSB masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing kecamatan, seperti: kendala pada pendanaan dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (Zahirah Zahrah, 2017).

Penanggulangan banjir tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses evakuasi dengan menjadi relawan atau memberikan masukan tentang kebutuhan pengendalian banjir lokal (Nur, 2022). Adapun relawan yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 101 orang. Namun dalam penanggulangan bencana banjir, masyarakat juga menjadi salah satu penyebab banjir. Hal tersebut diakibatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (www.detik.com, 2023).

Dari sektor swasta juga dapat mendukung upaya pengendalian banjir dengan menyediakan sumber daya keuangan dan membantu proses rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terkena bencana (Suleman et al., 2007). Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengendalian banjir dan mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan pengendalian banjir. Kegiatan tersebut diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dengan PT. Pertamina dengan menginisiasi pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (www.republika.com, 2022).

Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir. Hal ini guna memetakan kepentingan dan pemahaman dalam penanggulangan banjir, sehingga program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menganalisis bahwa masih terdapat kendala dalam hubungan antar *stakeholders* sehingga sekarang di kota Semarang. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini diharapkan dapat memetakan peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat keluhan dari masyarakat dan permasalahan sistem drainase
2. Mitigasi bencana di Kota Semarang belum maksimal (Kota Semarang baru berhasil menerapkan 52,6% atau 10 indikator dari 19 indikator mitigasi bencana.
3. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang belum maksimal (masih terdapat keluhan masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana banjir)
4. Kurangnya peran stakeholders dalam melakukan koordinasi dari masing-masing unit pelaksana (BPBD, DPU, Distaru, BBWS, Kelurahan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana banjir. Adapun focus dari permasalahan ini yaitu:

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam peran *stakeholders* pada penanggulangan banjir di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di kota Semarang.
2. Untuk menganalisis peran *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di kota Semarang.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dapat menambah wawasan, dan informasi mengenai peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu dalam menganalisis peran pemerintah mengenai banjir, serta menjadi tolak ukur kebijakan di masa mendatang, mengingat ancaman banjir yang terus terjadi di wilayah Kota Semarang. Kemudian bagi civitas akademika, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pustaka dalam melaksanakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai kontribusi kepada pemerintah Kota Semarang, terutama pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang serta pihak-pihak yang terlibat lainnya. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan peran *stakeholders* pada penanggulangan banjir.

1.5. Kerangka Penelitian Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Nama Jurnal dan Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muzakar Isa, Liana Mangifera	Analisis <i>Stakeholders</i> Dalam Pengurangan Risiko Banjir Di Kabupaten Klaten (Humaniora, Sosial, dan Agama, Tahun 2017)	Pendekatan <i>mixed method</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 14 stakeholders dalam pengurangan risiko banjir ini. Mereka memiliki 6 kepentingan yang berbeda beda, yaitu <i>income</i> , lingkungan, pembangunan daerah dan keselamatan jiwa. Dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten, BPBD mempunyai peran sentral bersama dengan Kepala Desa setempat dan relawan (masyarakat). Sedangkan perguruan tinggi merupakan aktor yang mempunyai pengaruh paling rendah dalam pengurangan risiko banjir ini
2	Dio Mahardika, Endang Larasati	Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi Banjir di Kota Semarang (Journal of Public Policy and Management Review, Tahun 2018)	Metode kualitatif dengan tipe deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota Semarang adalah mulai dari prabencana masih terdapat kekurangan yaitu belum terbentuknya rencana kontijensi, kemudian pada tahap terjadi bencana yaitu kekurangan logistik dan penanggulangan bencana. personil <i>emergency</i> , dan tahap terakhir pasca bencana masih terdapat kekurangan dimana bentuk rehabilitasi yang dilakukan BPBD masih ada yang kurang tepat sasaran.

3	Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuningsih	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Tahun 2020)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata halal pulau ini melibatkan pemangku kepentingan dengan konsep pentahelix yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Ada 38 pemangku kepentingan yang terlibat dan diklasifikasikan menjadi pemangku kepentingan primer, kunci dan sekunder. Peran pemangku kepentingan tercermin dalam peran pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Hubungan antar pemangku kepentingan dilihat dari bentuk dan kegiatannya. Nilai dan komunikasi merupakan faktor pendukung dalam pengembangan destinasi wisata halal, sedangkan kepercayaan dan kebijakan merupakan faktor penghambat.
4	Syahputra Adisanjaya Suleman, Nurliana Cipta Apsari	Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Manajemen Bencana Banjir (Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Tahun 2017)	Kualitatif	Peran <i>stakeholders</i> dalam manajemen bencana banjir yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB dan lembaga swasta dan internasional telah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun dapat dilihat dari tugas, fungsi dan perannya, bahwa BNPB/BPBD mempunyai peran yang secara langsung berwenang dalam penanganan bencana, khususnya pada mitigasi bencana banjir. Hal ini didasarkan pada pembentukan lembaga BNPB/BPBD sebagai pusat dalam penanggulangan bencana nasional dan daerah.
5	Fitri Handayani, Hardi Warsono	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat sekitar, dan pengusaha. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku

	DepartemenIl mu	di Kabupaten Rembang (Journal of Public Policy and Management Review, Tahun 2017)		kepentingan meliputi pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata lebih ditekankan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik. Faktor yang menghambat peran <i>stakeholderss</i> dalam pengembangan wisata Pantai Karang Jahe adalah keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, kegiatan promosi, dan kerjasama antar <i>stakeholderss</i> . Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu menjalin kerjasama antara pengelola Pantai Karang Jahe dengan pemilik lahan, membangun kesadaran wisata melalui kelompok sadar wisata, dan memberdayakan warga desa untuk memanfaatkan sampah menjadi produk komersial, sanksi diatur di desa dalam hal pendirian usaha pariwisata, pembenahan website Dinbudparpora terkait kegiatan promosi objek wisata Pantai Karang Jahe, serta perlu dilakukannya kerjasama yang mengikat antara stakeholders pendukung melalui nota kesepakatan kerjasama.
6	Annisa Novita Sari , Adi Susilo , Edi Susilo	<i>The Role of Stakeholderss in Flood Management: Study at Ponorogo, Indonesia (The International Journal of Engineering and Science, Tahun 2013)</i>	Kualitatif	Koordinator penanggulangan banjir adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mengkoordinir seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penanggulangan banjir yang terdiri dari prabencana, bencana dan pasca bencana. Prabencana merupakan tahapan penanggulangan banjir yang terdiri dari penanggulangan banjir dan dini berupa sistem peringatan. Pada fase bencana, para pemangku kepentingan berkolaborasi dalam tanggap darurat dan

				akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan pada fase pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana akan mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rusaknya infrastruktur yang ada.
7	Tri Yuniningsih, Ida Hayu Dwimawanti, Dyah Lituhayu	<i>The Role of Actors in Tourism Development in Tanjungpinang City, Riau Islands Province (Jurnal Administrasi Publik, tahun 2023)</i>	Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 45 aktor yang terlibat. Aktor dibagi menjadi lima peran. Aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan akselerator menjalankan peran mereka dengan baik. Beberapa aktor yang belum berperan optimal adalah fasilitator dan aktor pelaksana.
8	Tri Mulyani Sunarharum	<i>Managing Jakarta's Flood Risk After Hyogo: Policy And Plan Analyses (Conference Paper, Tahun 2016)</i>	Kualitatif	Kebijakan dan rencana ditingkat nasional menjadi kerangka kerja untuk menerjemahkan paradigma baru tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Terlepas dari kerangka kebijakan yang kuat yang mendasari strategi pengelolaan resiko banjir, ada peluang untuk meningkatkan mekanisme kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan rencana untuk memperkuat ketahanan bencana Jakarta
9	Gusti Ayu Maharani Ismadwijayanthi, I Wayan Mertha, Luh Nyoman Tri Lilasari	<i>The Role of Stakeholders in The Development of Tourism Attraction at Mertasari Beach, Sanur (Journal of Applied Science in Tourism Destination, Tahun 2023)</i>	Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bendesa Adat Intaran, BUPDA Intaran, Taman Inspirasi Muntig Siokan dan Desa Pokdarwis Sanur Kauh dikategorikan sebagai stakeholders primer. Stakeholders sekunder terdiri dari Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali dan Tribun Bali. Dinas Pariwisata Denpasar, dikategorikan sebagai pemangku kepentingan utama. Kemudian klasifikasi pemangku

				kepentingan berdasarkan perannya sebagai pembuat kebijakan adalah Bendesa Adat Intaran dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Bendesa Adat Intaran dan BUPDA Intaran juga bertindak sebagai koordinator, kemudian sebagai fasilitator adalah Taman Inspirasi Muntig Siokan, Perbekel Desa Sanur Kauh dan Dinas Pariwisata Denpasar. Taman Inspirasi Muntig Siokan dan BUPDA Intaran sebagai pelaksana dan kemudian sebagai akselerator adalah Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali, Pokdarwis Desa Sanur Kauh dan Tribun Bali.
10	Artiningsiha, Jawoto Sih Setyonob, Rizki Kirana Yuniartanti	<i>The challenges of disaster governance in an Indonesian multihazards city: a case of Semarang, Central Java (Social and Behavioral Sciences, Tahun 2016)</i>	Kualitatif	Hasil penelitian mengatakan bahwa masyarakat memiliki kapasitas yang paling tinggi dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan multibencana Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang memenuhi semua tahapan (Phases Pre Disaster, Event, Post Disaster and Monitoring Evaluation)

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam mengkaji informasi yang masih relevan terhadap permasalahan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isa (2014) dan Suleman (2007) memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini terkait peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir. Namun, dalam penelitian Isa (2014) yang berjudul “Analisis *Stakeholders* dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten” menggunakan metode pendekatan *mixed method*, yaitu perpaduan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan Suleman (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *Stakeholders* dalam Manajemen Bencana Banjir” menggunakan desain penelitian kualitatif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destiana (2020) dan Handayani (2017) memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Di mana kedua penelitian tersebut membahas tentang pengembangan objek wisata. Namun, kedua penelitian tersebut menggunakan teori yang sama dalam menganalisis peranan *stakeholders*, yang meliputi: *Policy creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Selanjutnya penelitian Mahardika (2018) memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang penanggulangan resiko di Kota Semarang. Penelitian tersebut juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Sunarhanum (2016) dan Sari (2013) yang juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, namun memiliki lokus kejadian yang berbeda, yaitu penanggulangan banjir di daerah Jakarta dan Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2023) dan Ismadwijayanthi (2023) menggunakan teori peran *stakeholders* yang sama dengan penelitian ini, meliputi: Policy creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Kemudian penelitian tersebut juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun memiliki lokus yang berbeda dengan penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan penelitian Artiningsih (2016) diketahui bahwa penelitian tersebut juga memiliki lokus yang sama yaitu di Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang” berfokus pada peran *stakeholders* dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Meskipun terdapat kesamaan metode dan teori dengan beberapa penelitian sebelumnya. Namun adanya unsur kebaruan dalam lokus penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan penelitian untuk masa yang akan datang.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban, (2014) administrasi publik merupakan suatu metode yang sumber daya dan *personel public* diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Kedua ahli ini juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang mengelola pengaruh publik dan mengimplementasikan tugas yang

diberikan. Dan sebagai disiplin ilmu, administrasi publik memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan publik dengan cara pemulihan atau peningkatan kualitas terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik juga diartikan sebagai koordinasi upaya individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, mencakup pekerjaan sehari-hari. Kemudian secara global dapat dimaknai sebagai proses yang melibatkan implementasi kebijakan pemerintah, keterampilan mengarahkan dan banyak teknik lainnya yang dapat memberikan arah dan tujuan pada upaya sejumlah orang (Syafiie, 2010).

Presepsi tentang administrasi public sangat bervariasi. Hal tersebut tergantung dari pandangan orang terhadap kata “administrasi publik” itu sendiri (Keban, 2014). Administrasi public dapat diartikan sebagai *administration of public* (administrasi dari publik), di mana pemerintah memiliki peran agen tugas yang berkuasa dan berinisiatif untuk mengatur dan mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat. Selanjutnya terdapat pandangan bahwa *administration for public* (administrasi untuk publik), di mana pemerintah lebih tanggap terhadap hal yang dibutuhkan masyarakat dan memahami cara terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian terdapat persepsi bahwa *administration by public* (administrasi oleh publik), di mana pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hidupnya secara mandiri agar tidak tergantung secara terus-menerus kepada pemerintah. Adapun Nicholas Henry dalam (Kaban,

2014) menyebutkan bahwa terdapat beberapa paradigma tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu:

1. Paradigma 1 (1900-1926), Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini dikembangkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Paradigma ini menyebutkan bahwa politik harus memfokuskan atensinya kepada kebijakan. Sedangkan administrasi difokuskan kepada pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pemisahan politik dan administrasi ini dilambangkan dalam bentuk pemisahan badan legislative dan badan eksekutif. Maksud dari paradigma ini yaitu administrasi dilihat sebagai suatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dari birokrasi pemerintahan. Namun, dalam paradigma ini kurang dijelaskan mengenai focus atau metode yang dikembangkan dalam administrasi public.
2. Paradigma 2 (1927-1937), Prinsip-prinsip Administrasi. Paradigma ini dikembangkan oleh Willoughby, Gullick dan Urwick. Beliau mengemukakan tentang prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi public. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja, termasuk organisasi pemerintah.
3. Paradigma (1950-1970), Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Beberapa ahli mempertanyakan paradigma-paradigma sebelumnya, di mana mereka beranggapan bahwa pemisahan politik dan administrasi merupakan tindakan

tidak realistis, serta prinsip administrasi tidak berlaku secara universal. Sehingga muncul pandangan baru di mana administrasi public sebagai ilmu politik dengan lokus birokrasi pemerintahan dan focus menjadi kabur karena prinsip administrasi memiliki banyak kelemahan. Periode ini menjadikan administrasi public mengalami krisis identitas, karena ilmu politik yang disiplin dianggap dominan dalam administrasi publik.

4. Paradigma 4 (1956-1970), Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Fokus dari paradigma ini yaitu mengembangkan prinsip-prinsip manajemen sebelumnya secara ilmiah dan mendalam. Namun perkembangan paradigma ini terbagi mejadi dua arah, yaitu: perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan mengarah kepada kebijakan publik.
5. Paradigma 5 (1970-1990), Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Adapun fokus dari paradigma ini yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya yaitu masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan public.
6. Paradigma 6 (1990-sekarang). Administrasi sebagai *Governance*. G. Shabbir Cheema dalam (Keban, 2014) menyebutkan bahwa sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana unsur-unsur ekonomi, sosial, dan politik dikelola berdasarkan interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Paradigma administrasi sebagai *governance* mengacu pada lokus administrasi

publik yaitu bagaimana dan mengapa organisasi tersebut bekerja, berperilaku dalam organisasi, dan keputusan tersebut diambil (Mariana, 2010).

Administrasi sebagai *governance* dilakukan oleh para *stakeholders* pada proses perumusan dan pelaksanaan dalam mencapai tujuan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang”, di mana pada penanggulangan banjir juga melibatkan banyak aktor. Tidak hanya pemerintahan tetapi juga melibatkan swasta dan masyarakat. Kemudian *good governance* dalam penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara *stakeholders*. Pada proses penanggulangan bencana banjir, pemerintah mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat dengan maksud dan tujuan untuk dapat memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masalah dapat timbul dalam berbagai macam, variasi dan intensitasnya. Sehingga, tidak semua isu publik dapat melahirkan kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat membuat orang berpikir, dan menemukan solusi yang dapat menciptakan kebijakan publik. Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan publik merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Namun, dalam proses kebijakan

publik juga perlu diperhatikan siapa yang berwenang merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Widodo (2018), ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup banyak bidang atau bidang pembangunan, seperti: kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dll. Selanjutnya, dari perspektif hierarki, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional atau lokal, misalnya Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya kebijakan publik didefinisikan oleh James E. Anderson dalam (Subarsono, 2015) yang menyebutkan bahwa kebijakan diputuskan oleh badan atau aparat pemerintah. Meskipun diakui bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor di luar pemerintah. Kemudian David Easton juga mengemukakan pendapatnya bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka pemerintah juga memberikan nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai.

Thomas Dye dalam (Subarsono, 2015) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsepnya sangat luas karena kebijakan publik mencakup apa yang dilakukannya. ketika menghadapi suatu masalah publik. Misalnya, ketika pemerintah menemukan jalan yang rusak dan tidak mengusulkan untuk memperbaikinya, maka pemerintah sudah memiliki kebijakan. Definisi Thomas Dye tentang kebijakan publik menyiratkan bahwa kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah, bukan badan swasta. Kemudian kebijakan publik menjadi pilihan yang harus atau tidak

harus dibuat oleh lembaga pemerintah. Pilihan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status *quo*, seperti tidak membayar pajak merupakan sebuah kebijakan publik.

Thomas Dye dalam (Widodo, 2018) mengemukakan pendapatnya tentang proses kebijakan publik yang meliputi:

1. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan: Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan(*demads*) tindakan pemerintah.
2. Penyusunan Agenda: merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada aparat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan: merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan: melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan: dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi
6. Evaluasi kebijakan: dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Permasalahan tentang kebencanaan direspon pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Shalih (2021) kerangka kebijakan tersebut merupakan suatu kerangka kerja dan serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi, mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana alam atau buatan manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi nyawa manusia, harta benda, lingkungan, dan ekonomi masyarakat dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Handmer (2007) memaparkan pemahamannya tentang keterkaitan antara kebijakan dan respon kelembagaan terhadap keadaan darurat (bencana):

1. *Problem framing*. Dalam pembedahan masalah, semua *stakeholders* dapat terlibat di dalamnya. Namun, pembedahan masalah lebih baik dilakukan dengan memasukkan: perdebatan sosial dan wacana yang sedang berlangsung antar bagian masyarakat, identifikasi penyebab dari kerentanan dan ketahanan, dan penilaian resiko secara terbuka.
2. *Policy framing and strategic policy choice*. Tujuan kebijakan di bidang bencana harus secara eksplisit mengatasi konflik yang ada. Poin krusial dalam proses kebijakan yaitu menentukan apa dan siapa yang diikutsertakan dan dikecualikan.
3. *Policy design and implementation*. Tujuan kebijakan melibatkan beberapa instrument seperti: keuangan, informasi, manusia,

administrasi, undang-undang, dll. Kemudian diperlukan mekanisme untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi.

4. *Policy monitoring and learning*. Tahap ini melibatkan observasi berkelanjutan dan pengumpulan data yang diperlukan secara rutin. Kaitan antara tahap 1 (pemantauan sistem manusia dan alam) memerlukan integrasi kebijakan dan pemantauan dasar yang memungkinkan pemisahan dampak dari intervensi kebijakan.

Kebijakan bencana adalah komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan mempersiapkan diri terhadap ancaman bencana. Tujuannya bukan hanya untuk merespons bencana saat terjadi, tetapi juga untuk mengurangi risiko bencana di masa depan dan membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana. Kebijakan bencana yang efektif adalah salah satu langkah kunci dalam menjaga ketahanan masyarakat dan lingkungan.

1.5.4 Analisis Peran Stakeholders

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) menurut Lattimoree dalam Putri (2018) adalah individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan suatu kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. *Stakeholders* yang terlibat dapat mencakup individu ataupun kelompok yang terkena dampak seperti otoritas pemerintah nasional atau lokal,

politisi, pemimpin agama, organisasi dan kelompok masyarakat sipil dengan minat khusus, komunitas akademis, atau bisnis lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Durham et al. (2014) yang menyebutkan bahwa *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penelitian. Definisi ini mencakup siapa saja, atau kelompok apa pun, yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu kegiatan dan mungkin memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif.

Analisis peran *stakeholders* dalam studi kebijakan dilaksanakan untuk menunjukkan peranan dari para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat (Hidayah et al., 2019). Adapun peran menurut David Adi Susilo (2019) yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana mereka memiliki posisi dalam status sosial. Kemudian peran juga mencakup beberapa syarat, yaitu: norma yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dan hubungan yang teratur akibat suatu jabatan. Selain itu, *stakeholders* mempunyai karakteristik yang dapat mempengaruhi proses kebijakan. Sehingga Handayani and Warsono dalam (Talib, 2020) mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Stakeholders* utama (Primer): merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut.

2. *Stakeholders* kunci: *stakeholders* yang berpengaruh kuat dan mempunyai kewenangan terhadap kelancaran kegiatan, serta memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.
3. *Stakeholders* sekunder: *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan kebijakan dikelompokkan oleh Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) menjadi 5 bagian yaitu:

- a. *Policy Creator*, yaitu *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat. Menurut (Destiana, 2020) Koordinator dituntut memiliki indikasi, yaitu:
 - a) *Having a global picture*, yaitu kemampuan untuk memahami visi jangka panjang dari semua elemen yang dipimpinnya.
 - b) *Setting a common goal*, yaitu kemampuan untuk memilih elemen yang dapat dijadikan sebagai roda penggerak utama sehingga dapat memicu pergerakan lainnya.

- c) *Knowing your team and defining team roles*, yaitu kemampuan untuk memahami kekuatan spesifik dari masing-masing elemen di dalam menjalankan tugasnya.
 - d) *Planning*, yaitu kemampuan menyusun tugas pokok dan fungsi elemen secara lengkap agar alokasi waktu, biaya dan target capaian dapat ditinjau ulang secara berkala
 - e) *Communicating and disseminating*, yaitu penyebaran informasi berupa program yang sudah disusun menjadi suatu aksi yang dapat dilakukan oleh semua *stakeholders*
 - f) *Review and controlling*, yaitu mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Fasilitator, yaitu *stakeholders* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Fasilitator memiliki dukungan anggaran sehingga pengembangan sarana dan prasarana penanggulangan banjir dapat berjalan dengan baik.
 - d. Implementor, yaitu *stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
 - e. Akselerator, yaitu *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penelitian memberikan dampak positif, seperti: mendapatkan akses ke informasi atau sumber daya tambahan, dan meningkatkan relevansi atau kegunaan penelitian bagi pengguna dan penerima manfaat. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, hasil penelitian dapat disesuaikan secara lebih efektif dengan konteks lokal, meningkatkan kemungkinan bahwa hasil tersebut diadopsi dan diterapkan, dan menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi semuanya. Dalam penelitian mengenai Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang, penulis menemukan informasi dari *preliminary research* bahwa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir yaitu BPBD, Disperkim, DPU, dan BBWS. Namun, tidak semua pemangku kepentingan dalam kelompok akan berbagi kekhawatiran atau memiliki pendapat atau prioritas yang sama.

1.5.5 Penanggulangan Bencana

Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian kejadian yang ditimbulkan oleh faktor alam atau faktor nonalam sehingga dapat mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat (Carter, 2008) di mana bencana adalah suatu peristiwa alam atau buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba atau progresif yang berdampak pada manusia. Sehingga masyarakat perlu mengambil langkah penanggulangan terhadap dampak tersebut. Penanggulangan tersebut melibatkan banyak pihak yang harus bekerja sama untuk mencegah,

memitigasi, mempersiapkan, merespon, dari dampak bencana. Carter dalam penelitiannya juga mendefenisikan penanggulangan bencana sebagai ilmu terapan yang melakukan pengamatan dan analisis bencana secara sistematis, untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana pada manusia, hewan, lingkungan, dan harta benda. Adapun tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2017), yaitu:

1. Tahap pra-bencana yang dilakukan ketika tidak ada bencana namun ada kemungkinan terjadinya.
2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan saat bencana sedang berlangsung.
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadinya bencana.

Dalam semua tahapan penanggulangan bencana tersebut, terdapat tiga jenis manajemen yang digunakan, yaitu:

a. Manajemen Resiko Bencana.

Manajemen resiko bencana merupakan pengelolaan bencana yang berfokus pada upaya mengurangi risiko sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini diimplementasikan dalam bentuk.

- a) Pencegahan (*Prevention*): yaitu kegiatan untuk mencegah terjadinya bencana yang mempunyai dampak berbahaya pada masyarakat.

Pencegahan dapat dilakukan dengan membuat bendungan atau tanggul untuk mengendalikan arus banjir.

- b) Mitigasi (*Mitigation*): yaitu kegiatan untuk mengurangi dampak dari bencana seperti banjir. Mitigasi memiliki beberapa langkah seperti untuk mengenali resiko, kesadaran akan bencana resiko, dan perencanaan penanggulangan.
- c) Kesiapsiagaan (*Preparedness*): yaitu kegiatan yang diharapkan agar pemerintah, masyarakat, dan individu dapat menanggapi bencana secara cepat dan efektif. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan kesiapsiagaan, seperti: merumuskan perencanaan penanggulangan bencana, memelihara persediaan sumber daya, dan pelatihan personil.

b. Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan merupakan pengaturan upaya penanganan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan kerugian dan korban serta penanganan pengungsi selama bencana berlangsung. Adapun fase-fase yang ditetapkan, yaitu:

- a) Tanggap darurat bencana: merupakan rangkaian tindakan yang segera dilakukan ketika terjadi bencana untuk mengatasi dampak negatifnya, termasuk tindakan penyelamatan dan evakuasi orang dan harta benda, memenuhi kebutuhan dasar, memberikan perlindungan, mengurus pengungsi, menyelamatkan, serta memulihkan infrastruktur dan fasilitas.

c. Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan merupakan pengaturan upaya pemulihan bencana yang menekankan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana. Pemulihan ini dilakukan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyeluruh mengaktifkan kembali lembaga-lembaga, infrastruktur, dan fasilitas setelah terjadinya bencana, dengan fase-fase yang telah ditentukan, yaitu:

- a) Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua sektor pelayanan publik atau masyarakat hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah tertentu, dengan tujuan utama mengembalikan atau menjalankan secara normal semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah setelah bencana.
- b) Rekonstruksi, pada semua infrastruktur dan fasilitas, serta lembaga-lembaga di wilayah pasca bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan tujuan utama mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, menerapkan hukum dan ketertiban, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan bersama di wilayah pasca bencana.

Bencana berupa banjir memerlukan penanggulangan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik

maka dibutuhkan manajemen bencana. Manajemen bencana menurut (Suleman, 2007) merupakan ilmu tentang kebencanaan dan segala aspek terkait dengan bencana, khususnya resiko bencana dan pencegahan resiko bencana. Kemudian menurut William Nick Carter dalam (Suleman, 2007) disebutkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan beberapa tahapan, yaitu: persiapan, penanganan, perbaikan akibat kerusakan, evakuasi sarana dan prasarana sosial yang rusak. Selain itu tahapan manajemen bencana juga disampaikan oleh Nurjanah dalam (Suleman, 2007) yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Tahapan-tahapan tersebut memiliki prinsip praktis, diantaranya yaitu: Cepat dan tepat, Prioritas, Koordinasi dan keterpaduan, Berdayaguna dan berhasil guna, Transparansi dan akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Non diskriminatif, Non-Proselitasi.

1.5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Stakeholders

Analisis peran *stakeholders* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Dalam penelitian Destiana, dkk (2020) menyebutkan bahwa terdapat 4 unsur yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pada peran *stakeholders*, yaitu:

- a. Nilai: Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu harga sesuatu, angka kedalaman, kadar mutu, dan banyak sedikitnya isi. Nilai dapat dijadikan sebagai sebuah prinsip atau standar terhadap kualitas yang dianggap berharga. Menurut Schwartz dalam (Dahriyanto, 2018) nilai merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dengan tingkat

kepentingan yang berbeda-beda, serta menjadi prinsip panutan dalam entitas sosial.

Analisis peran *stakeholders* memiliki beberapa nilai seperti: nilai individual, organisasi, legalitas, dan profesionalitas. Nilai individual dilihat dari peran kepemimpinan sebagai penggerak dalam penanggulangan banjir. Kemudian nilai organisasi dilihat dari landasan masing-masing institusi. Selanjutnya legalitas, di mana menilai peningkatan penanggulangan banjir berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Terakhir yaitu nilai profesionalitas dilihat dari kemampuan dan komitmen individu yang melaksanakan kebijakan terkait penanggulangan banjir.

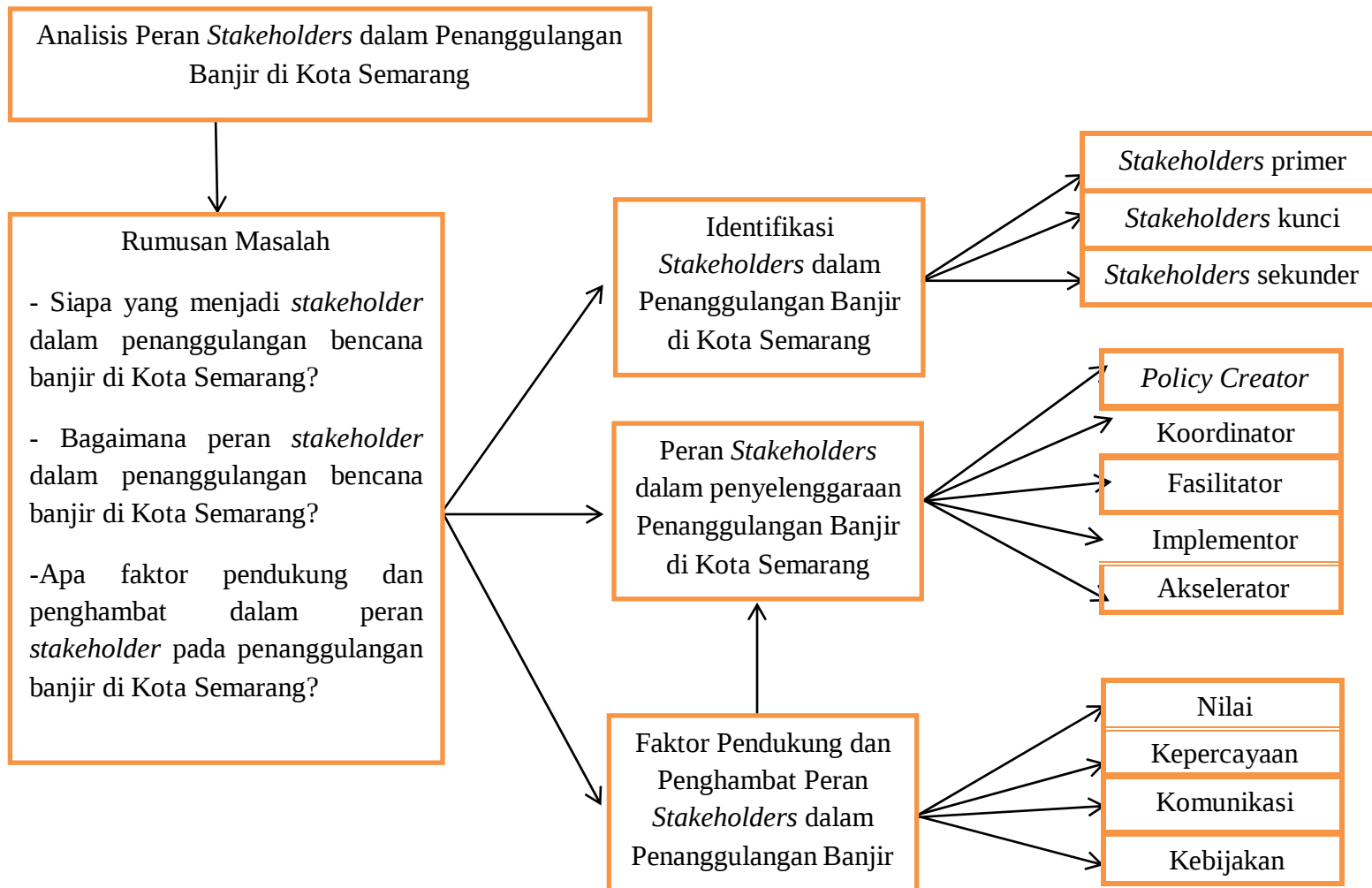
- b. Komunikasi: Hubungan antar *stakeholders* dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh komunikasi yang baik (Destiana, 2020). Harold Lasswell menyebutkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu: pengirim pesan, pesan, media, penerima pesan, dan efek atau umpan balik. Sehingga berdasarkan unsur tersebut komunikasi juga diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh pengirim pesan melalui media tertentu kepada penerima pesan. Komunikasi yang efektif di mana *stakeholders* secara aktif terlibat, dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengatasi konflik, serta dapat membentuk hubungan yang baik.

c. Kepercayaan: Menurut Colquitt, LePine dan Wesson dalam (Qomariah, 2014) kepercayaan adalah keinginan untuk menggantungkan diri pada suatu otoritas yang didasarkan pada pengharapan positif akan tindakan dan perhatian otoritas. Kemudian George dan Jones dalam (Qomariah, 2014) juga menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan ungkapan keyakinan terhadap orang lain atau kelompok, sehingga tidak akan berisiko untuk dihancurkan atau dilukai oleh tindakan mereka. Namun, hubungan yang terjalin antar *stakeholders* memiliki peluang munculnya rasa kurang percaya di antara *stakeholders*. Hal tersebut dapat muncul karena kurangnya koordinasi dan sinergi, serta arahan dari sektor utama dalam upaya penanggulangan banjir. Oleh karena itu, menurut (Qomariah, 2014) dalam membangun kepercayaan dibutuhkan yaitu:

1. Integritas, yaitu mengacu pada kejujuran dan kebenaran
2. Kompetensi, yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal yang dimiliki individu.
3. Konsistensi, yaitu berhubungan dengan keandalan, kemampuan memprediksi dan penilaian individu dalam menangani situasi.
4. Loyalitas, yaitu keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain.
5. Keterbukaan, yaitu memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam mengakses informasi.

- d. Kebijakan: Kebijakan merupakan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan (Keban, 2014). Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan sebagai landasan dalam penanggulangan banjir. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

1.5.7 Kerangka Berpikir



1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep merupakan batasan atau rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk menyesuaikan variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala yang memberi arti pada variabel tersebut. Operasionalisasi dalam penelitian ini tidak terlepas dari analisis peran *stakeholders* untuk membantu menganalisis peran antar aktor. Untuk menghindari salah tafsir istilah yang digunakan dan untuk kemudahan pemahaman, beberapa konsep telah dioperasionalkan.

1. Identifikasi *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.
 - a) *Stakeholders* primer memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdampak secara langsung dari kegiatan tersebut.
 - b. Memiliki kepentingan dalam tahapan-tahapan kegiatan.
 - b) *Stakeholders* kunci memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kewenangan terhadap kelancaran kegiatan
 - b. Memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan
 - c) *Stakeholders* sekunder memiliki kriteria yaitu sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepedulian besar terhadap proses kegiatan
 - b. Menjadi fasilitator dalam proses kegiatan.

2. Peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

a) *Policy Creator*

Stakeholders sebagai *policy creator* yaitu bertugas sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Dalam penelitian ini *policy creator* dilihat dari kriteria sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam penetapan kebijakan.
- b. Pengaruh dalam menetapkan keputusan.

b) Koordinator

Koordinator pada penanggulangan banjir perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan *stakeholders* lainnya. Menurut (Destiana, 2020) koordinator dituntut untuk memiliki kemampuan dengan kriteria:

- a. Keterlibatan dalam koordinasi.
- b. Pengaruh yang diberikan dalam koordinasi.

c) Fasilitator

Stakeholders sebagai fasilitator perlu menunjukkan keterlibatannya berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Fasilitator memiliki kriteria berupa:

- a. Kemampuan menyediakan fasilitas yang menunjang penanggulangan banjir.
- b. Kemampuan dalam memberdayakan sumber daya manusia.
- c. Kemampuan dalam melibatkan masyarakat pada upaya penanggulangan bencana banjir.

d) Implementator

Stakeholders sebagai implementator melaksanakan kegiatan penanggulangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kriteria *stakeholders* sebagai implementator yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan.
- b. Melaksanakan penanggulangan banjir secara efektif dan efisien.

e) Akselerator

Adapun kriteria *stakeholders* sebagai accelerator yaitu:

- a. Bentuk kontribusi yang diberikan dalam percepatan suatu program.
- b. Kemampuan untuk memberikan dukungan atau inovasi.

3. Faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

1) Nilai

Nilai menjadi acuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Terdapat beberapa pertimbangan mengenai adanya nilai dalam suatu kegiatan, diantaranya yaitu:

- a. Pemahaman *stakeholders* terhadap nilai yang diterapkan
- b. Tingkat kepentingan nilai dari setiap *stakeholders*

2) Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu penunjang dalam hubungan kerjasama antar *stakeholders*. Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan kriteria, yaitu:

- a. Menyampaikan informasi secara bertahap dan mudah diakses
- b. Memiliki kesepahaman (sinergi) antar *stakeholders*
- c. Adanya pemahaman/kesadaran masyarakat

3) Kepercayaan

Tujuan penanggulangan banjir dapat dicapai dengan cara melibatkan komunikasi yang dapat membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan antar *stakeholders*, diperlukan kriteria menurut Robbins dan Judge dalam (Qomariah, 2014), yaitu:

- a. Integritas
- b. Kompetensi
- c. Konsistensi
- d. Loyalitas
- e. Keterbukaan

4) Kebijakan

Stakeholders bertindak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Banjir, *stakeholders* berpedoman pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

1.7. Argumen penelitian

Penelitian Administrasi Publik merupakan sarana ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu, dan penggunaannya melibatkan seluruh proses penyelenggaraan dengan upaya kerjasama dua orang atau lebih atau upaya bersama untuk menggunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan. Masalah utama administrasi yaitu menguasai, menghimpun, dan menggunakan unsur-unsur penelitian secara efektif dan efisien. Implementasi administrasi sendiri memiliki landasan kegiatan yang berpedoman pada empat prinsip, yaitu: fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas, orientasi tujuan dan kontinuitas. Masalah dalam Administrasi Publik tentunya berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut orang banyak atau publik sehingga bisa digolongkan kedalam manajemen ataupun kebijakan publik.

Pada penelitian “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang” dapat diidentifikasi sebagai riset Administrasi Publik karena pada penelitian ini, terdapat permasalahan publik yaitu bencana banjir yang memberikan dampak negatif pada kelangsungan hidup masyarakat terutama bagi yang terdampak bencana. Adapun kebijakan yang diimplementasikan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maupun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Selain itu, keterlibatan *stakeholders* juga tidak dapat menghentikan terjadinya banjir di Kota Semarang. Oleh

karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana peran *stakeholders* dalam implementasi penanggulangan banjir di kota Semarang dengan menggunakan analisis Nugroho (2014) yaitu: *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono dalam penelitian deskriptif (Pasolong, 2020) yaitu di mana suatu penelitian yang menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi ketika melakukan penelitian. Kemudian terdapat upaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi atau yang ada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini dan untuk mengkonfirmasi hubungan antara variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, bersifat objektif dan hanya menjelaskan informasi. Sehingga dalam penelitian deskriptif, kata tanya “bagaimana” menjadi hal yang umum digunakan saat membuat teks pertanyaan penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta melakukan

analisa kekelurahan yang rawan mengalami banjir di Kota Semarang yaitu Kelurahan Tanjung Mas.

1.8.3 Subjek Penelitian

Berkaitan dengan isi penelitian, subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu unsur yang ada dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sehingga dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik ini mengambil sampel yang digunakan dengan langsung menunjuk ke seseorang yang dianggap mewakili karakteristik populasi. Seperti subjek utama dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, serta instansi-instransi terkait dan subjek pendukung penelitian seperti masyarakat yang terdampak bencana banjir. Berdasarkan *Preliminary Research* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, diketahui bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.3 Profil Informan

No.	Informan	Kriteria Informan
1.	Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Menguasai atau memahami upaya penanggulangan bencana banjir.
2.	Sub <i>Coordinator</i> Sumber Daya Air dan Drainase Dinas	2. Terlibat langsung dalam upaya meminimalisir terjadinya bencana banjir

	Pekerjaan Umum Kota Semarang	di Kota Semarang. 3. Ketersediaan informan di lapangan.
3.	Pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	4. Merasakan dampak dari bencana banjir di Kota Semarang.
4.	Pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	5. Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan bahasa sendiri.
5.	Lurah yang tergabung dalam Kelurahan Siaga Bencana (KSB)	
6.	Masyarakat Kota Semarang	

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

1.8.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini artinya nilai dari suatu perubahan yang tidak bisa dijelaskan dalam angka-angka. Kemudian jenis data yang mendukung penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Contoh data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan, yaitu dari orang yang menjadi subjek wawancara peneliti di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Kemudian penelitian ini juga didukung oleh data sekunder, di mana semua

data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan di Instansi, atau dari mana saja sudah diolah.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara dapat dilakukan secara langsung (personal interview) ataupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara langsung. Wawancara langsung adalah pembicaraan 2 arah yang dilakukan sang pewawancara (interviewer) terhadap responden atau informan. Hal ini guna untuk menggali informasi relevan menggunakan tujuan penelitian. Perbedaan wawancara ini dengan pembicaraan sehari-hari yaitu umumnya yang menjadi partisipan atau responden adalah orang asing yang belum dikenal sebelumnya, serta pembicaraan diarahkan oleh sang pewawancara. Adapun informan yang diwawancarai terkait dengan penelitian ini, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kelurahan Siaga Bencana (KSB), dan masyarakat.

Partisipan diminta untuk memberikan informasi berupa fakta, opini, perilaku, dan lain-lain. Wawancara langsung dapat dilakukan secara informal atau formal

(terstruktur). Untuk wawancara secara informal, pewawancara hanya perlu mengingat pertanyaan kunci yang dipakai untuk mendapatkan informasi. Sedangkan pada wawancara formal, pewawancara berpedoman pada daftar pertanyaan (*interview guide*) yang sudah dipersiapkan. Adapun teknik wawancara langsung yang dapat diterapkan oleh pewawancara yaitu: menjaga momentum pengenalan, tepat waktu dalam melaksanakan wawancara, dan tidak bertele-tele dalam memberikan pertanyaan tentang penelitian. Wawancara pada analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang menggunakan teknik wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (*interview guide*).

2. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi literatur menurut Yaniawati (2020) merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen, foto, gambar, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung proses penelitian. Studi pustaka dapat mempengaruhi kreadibilitas hasil suatu penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

Kegiatan studi pustaka mengandung uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer pada studi kepustakaan

didapatkan dari laporan penelitian dan hasil wawancara. Sedangkan sumber sekunder pada studi kepustakaan didapatkan dari: tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan yang tidak langsung disaksikan atau dialami oleh peneliti.

Tabel 1.4 Matriks Teknik Pengumpulan Data

Jenis Pengumpulan Data	Opsi-Opsi	Kelebihan	Kelemahan
Wawancara	Berhadapan secara langsung yaitu peneliti melakukan wawancara perorangan.	Partisipan bisa lebih leluasa memberikan informasi historis yang memungkinkan peneliti mengontrol alur tanya jawab.	- Informasi yang diperoleh bisa saja tidak murni karena masih disaring kembali oleh peneliti. - Tidak semua orang punya kemampuan artikulasi dan presepsi yang setara.
Studi Pustaka	Dokumentasi public, koran atau makalah.	- Menyajikan data yang berbobot. - Dapat diakses kapan saja. - Memungkinkan peneliti untuk memperoleh bahasa dan kata-kata teksual.	- Mengharuskan peneliti menggali informasi dari tempat-tempat yang mungkin sulit ditemukan. - Dokumen bisa saja diproteksi dan tidak memberikan akses privat maupun public. - Materi sangat mungkin tidak lengkap.

Sumber: Haryoko, dkk (2020)

1.8.6 Analisis dan Intrepetasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Maleong, 2021) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilakukan saat bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan diputuskan. Sedangkan interprestasi data yaitu upaya yang dilakukan untuk memperoleh makna yang lebih dalam dan luas dari hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara menelaah secara kritis temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan serta informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data dibagi menjadi dua jenis yaitu analisis deskriptif dan analisis sebab akibat dan hubungan antar variabel. Analisis deskriptif berguna untuk menunjukkan kondisi atau letak suatu subjek pada waktu tertentu. Sedangkan analisis sebab akibat yaitu analisis yang meneliti bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini lebih didasarkan pada jenis analisis deskriptif yang mengkaji suatu variabel. Adapun langkah dalam menganalisis data kualitatif menurut Rijali (2018), yaitu:

1. Pengumpulan data

Hal ini berkaitan dengan teknik penggalan data serta sumber dan jenis data dalam penelitian kualitatif. Sumber utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sedangkan sumber

tambahan merupakan sumber dari dokumen resmi, dokumen pribadi dan arsip (Maleong, 2021).

2. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan. Adapun langkah dalam melakukan reduksi data, yaitu: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, dan proposisi. Kesimpulan ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis.

1.8.7 Kualitas Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik triangulasi data. Triangulasi dimaksudkan sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi fakta yang ada dalam konteks penelitian sekaligus mengumpulkan data kejadian dan hubungan yang berbeda dari berbagai

prespektif. Menurut Denzin dalam (Moleong, 2021) mengklasifikasikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan kedalam empat macam, yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori.

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas data dengan cara menganalisis sumber, sehingga peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Sumber berdasarkan metode perolehan data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari metode wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip data. Kemudian dalam mencari kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber, wawancara dilakukan kepada lebih dari satu subjek sehingga menghasilkan bukti atau padangan yang berbeda terkait peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

Tabel 1.5 Triangulasi Sumber

No.	Data	Sumber (informan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Tugas dan Fungsi dalam upaya penanggulangan bencana banjir.						
2.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai <i>policy creator</i> .						
3.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai coordinator.						
4.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai fasilitator.						
5.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai implementator.						
6.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai akselerator.						
7.	Penerapan nilai dalam upaya penanggulangan banjir.						
8.	Penerapan kepercayaan antar <i>stakeholders</i> .						
9.	Pengaruh komunikasi pada penanggulangan banjir.						
10.	Kebijakan yang diterapkan pada penanggulangan bencana banjir.						

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

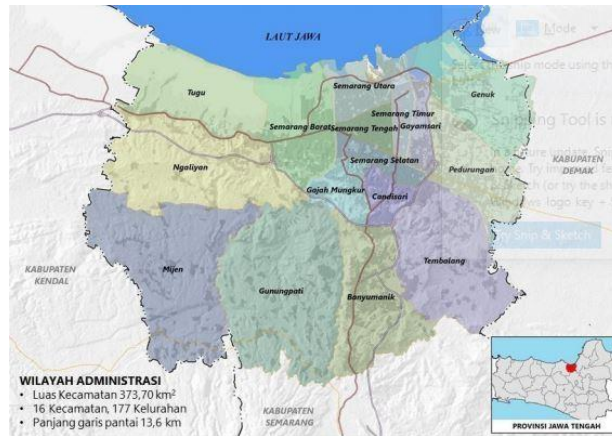
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.2. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis

Kota Semarang secara geografis terletak antara 6 50'-7 10' Lintang selatan dan garis 109 35'-110 50' Bujur timur. Secara administratif, daerah utara Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kota Semarang Tahun 2005-2025, luas Kota Semarang sebelum tahun 1976 yaitu 99,40 km². Setelah terjadinya pemekaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, dengan menggabungkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak luas wilayah Kota menjadi 373,70 km². Luas wilayah Kota Semarang tersebut sekitar 1,15 % dari total luas daratan provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.1 Luas dan batas Wilayah Administrasi Kota Semarang

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun (2021-2026)

Kota Semarang secara topografi memiliki daerah pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai dengan 2%. Kemudian dataran rendah memiliki kemiringan antara 2-15%, dan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 15-40%, serta beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40%. Kota Semarang secara kewilayahan termasuk kedalam wilayah Kedungsepur, yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan. Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan 17 Desa di pesisir dan 160 desa bukan pesisir. Adapun kecamatan di Kota Semarang yaitu:

Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Mijen	14
2.	Gunung Pati	16
3.	Banyumanik	11
4.	Gajahmungkur	8

5.	Semarang Selatan	10
6.	Candisari	7
7.	Tembalang	12
8.	Pedurungan	12
9.	Genuk	13
10.	Gayamsari	7
11.	Semarang Timur	10
12.	Semarang Utara	9
13.	Semarang Tengah	15
14.	Semarang Barat	16
15.	Tugu	7
16.	Ngaliyan	10
	TOTAL	177

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun (2021-2026)

2.1.2. Kondisi Demografi

Kota Semarang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut data BPS sampai tahun 2022 sebesar 1.659.975 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan, salah satunya yaitu banjir. Bencana banjir pada tahun 2022 menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terjadi sebanyak 63 kejadian. Kejadian tersebut memberikan kerugian pada daerah terdampak. Adapun daerah di Kota Semarang yang terdampak banjir, yaitu:

Tabel 2.2 Data Daerah Terdampak Banjir Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kelurahan
1.	Semarang Utara	116054.00	a. Tanjungmas b. Kalibaru
2.	Gunung Pati	98674.00	Plalangan
3.	Tembalang	193480.00	a. Tandang b. Rowosari c. Sendangguwo
4.	Pedurungan	193125.00	Muktiharjo Kidul
5.	Gayamsari	69334.00	a. Tambakrejo b. Siwalan
6.	Tugu	33079.00	a. Mangkang Wetan b. Mangunharjo c. Mangkang Kulon
7.	Semarang Barat	146915.00	Kembangarum
8.	Ngaliyan	142553.00	Wonosari

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa masih banyak daerah di Kota Semarang yang rawan terkena banjir. Hal tersebut memberikan dampak negative bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah melakukan upaya untuk mengetahui potensi kerawanan banjir dengan upaya: mengolah data curah hujan, kemiringan lahan, ketinggian lahan, jenis tanah, dan penggunaan lahan serta kerapatan sungai.



Gambar 2.2 Peta Persebaran Curah Hujan di Kota Semarang Tahun 2022

Sumber: BMKG (2023)

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya dalam mengurangi kerugian yang ditimbulkan banjir. Salah satunya yaitu dengan melakukan pemetaan daerah rawan banjir. Pemetaan tersebut bertujuan untuk meminimalisir dampak dan kerugian dari bencana banjir.

2.2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Semarang

2.2.1. Visi dan Misi

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan lembaga pemerintahan non departemen. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota yang keduanya

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”. Dimana visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisi.
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

2.2.2. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (otonomi daerah). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang dan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39

tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang.

Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB.
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan.
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB.

9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Sumber : BPBD (2023)

Adapun tugas dari masing-masing komposisi diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- 2) Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD.
- 6) Penyusunan laporan kinerja BPBD.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi.
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi.

- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi.
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD.
 - e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD.
 - f) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD.
 - g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan.
 - c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
 - d) Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD.
 - e) Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD.
 - f) Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.
 - g) Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan.
 - h) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD.
- c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas.
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian.

- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
 - b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
 - d) Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana.
 - e) Pembuatan rencana aksi daerah.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Bidang Logistik, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik.

- b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan logistik.
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik.
 - d) Pengkoordinasian pembentukan tim kaji cepat.
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
 - f) Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rekonstruksi, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - d) Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.
 - e) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana.

- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.

2.3. Gambaran Umum Banjir di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang sering mengalami banjir. Pada Tahun 1971, bencana banjir sering melanda beberapa bagian pusat kota terutama daerah Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Daerah tersebut sering mengalami banjir karena bentuk lahan yang lebih rendah dan satuan bentuk lahan yang luas. Kemudian pada Tahun 2000, luapan banjir semakin meluas dikarenakan pengaturan tata letak hunian yang berpusat di daerah utara. Bencana banjir masih menjadi persoalan hingga saat ini. Kota Semarang menghadapi risiko banjir karena beberapa faktor, termasuk curah hujan tinggi, geografi wilayah, erosi tanah, dan perubahan iklim. Berikut adalah gambaran umum tentang banjir di Kota Semarang:

1. Curah Hujan Tinggi: Salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir di Kota Semarang adalah curah hujan yang tinggi, terutama selama musim penghujan. Hujan deras dapat menyebabkan sungai-sungai yang mengalir melalui kota ini meluap, membanjiri daerah perkotaan.
2. Pembangunan Tanah dan Perubahan Lingkungan: Perkembangan perkotaan dan pembangunan tanah di Kota Semarang telah mengurangi kemampuan alamiah daerah ini untuk menyerap air hujan. Penurunan daerah berawa dan

pembangunan gedung-gedung di daerah rawan banjir juga memperparah masalah.

3. **Infrastruktur Drainase yang Tidak Memadai:** Sistem drainase di Kota Semarang sering kali tidak memadai untuk mengatasi curah hujan yang tinggi. Saluran drainase yang tersumbat dan pengelolaan air limbah yang buruk dapat memperlambat aliran air, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko banjir.
4. **Dampak Sosial dan Ekonomi:** Banjir di Kota Semarang dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan terputus, dan bisnis terganggu. Korban banjir sering kali harus mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang, diketahui bahwa bencana banjir terjadi dari tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.3. Jumlah Kejadian Banjir Tahun 2022

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA TH. 2022
BPBD KOTA SEMARANG

No.	JENIS KEJADIAN	B U L A N												JUMLAH
		Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Banjir	31	7	0	3	1	6	0	0	1	6	8		63
2	R o b	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0		7
3	Talud Longsor	34	6	4	2	7	15	7	1	1	25	8		110
4	Puting Beliung	15	1	0	3	0	1	0	0	1	6	1		28
5	Rumah Roboh	7	7	5	1	1	7	3	4	2	11	2		50
6	Kebakaran	2	6	0	3	4	6	2	5	2	9			39
7	Pohon Tumbang	27	9	1	0	1	2	0	1	2	3			46
	<i>Jumlah per bulan</i>	116	36	10	12	16	42	12	11	9	60			
	<i>Total kjd selama 1 thn</i>													324

Sumber: BPBD (2023)

Berdasarkan data rekaman waktu terjadinya banjir tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir merupakan bencana nomor dua paling sering terjadi di Kota Semarang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan upaya pengendalian banjir dalam mencapai sasaran Kota Semarang sebagai kawasan bebas banjir. Kota Semarang saat ini memiliki 4 sistem drainase, yang terdiri dari drainase utama yaitu: system drainase Mangkang, system drainase Semarang Barat, system drainase Semarang Tengah dan system drainase Semarang Timur. Kondisi saluran drainase di Kota Semarang, beberapa masih berfungsi sebagai saluran irigasi, yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Semarang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh menggunakan metode wawancara dan studi pustaka yang dijelaskan dalam bentuk uraian hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara formal menggunakan daftar pertanyaan (*interview guide*) yang dapat memudahkan peneliti di lapangan agar tetap fokus terhadap kriteria yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir serta faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai salah satu metode untuk menjamin keabsahan data. Adapun data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yang dipilih menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*). Teknik ini menunjuk langsung pihak yang dianggap dapat mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Warga Kelurahan Tanjung Mas.

Tabel 3.1 Profil Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Informan 1	Sekretaris BPBD Kota Semarang
2.	Informan 2	Sub koordinator Operasi dan pemeliharaan Drainase DPU
3.	Informan 3	Pelaksana Teknik PKK Perencanaan dan Program BBWS Pemali Juana
4.	Informan 4	Pegawai Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Penataan Ruang
5.	Informan 5	Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Mas
6.	Informan 6	Warga Kelurahan Tanjung Mas

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

3.1. Identifikasi *Stakeholders*

Dalam penelitian ini, identifikasi *stakeholders* menggunakan teori Handayani dan Warsono dalam (Talib, 2020) yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 3 bagian yaitu: *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung,

baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai tanggung jawab dan kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut. Kemudian *stakeholders* kunci berarti *stakeholders* yang berpengaruh kuat dan mempunyai kewenangan terhadap kelancaran kegiatan, serta memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan. Selanjutnya *stakeholders* sekunder yaitu *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* sekunder dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Penanggulangan banjir di Kota Semarang telah dilaksanakan oleh beberapa *stakeholders* terkait tiap tahunnya. *Stakeholders* yang terlibat memiliki tugas dan wewenang dalam pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan banjir. Adapun *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Warga Kelurahan Tanjung Mas.

3.1.1. *Stakeholders* Kunci

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan *stakeholders* kunci yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

Sebagai *stakeholders* kunci, BPBD memiliki pengaruh kuat dan mempunyai kewenangan terhadap kelancaran kegiatan penanggulangan bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana, meliputi: pra bencana, saat tanggap bencana, dan pasca bencana. Dalam penanggulangan bencana, BPBD lebih banyak berfungsi sebagai koordinator penanggulangan bencana baik antar instansi pemerintah maupun pemerintah dengan organisasi masyarakat. Selain itu, permasalahan penanggulangan bencana tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara bersama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang menyebutkan bahwa:

“Penanggulangan banjir dari BPBD tentu bekerja sama dengan banyak pihak. Diantaranya itu ada dengan Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian kami dari BPBD dalam koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Bapeda, Dinas Penataan Ruang, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kuelurahan terkait, seperti itu. Sesuai dengan tupoksi, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam upaya penanggulangan bencana banjir menjalankan peran sebagai koordinator. Komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait juga terus dilaksanakan. Untuk penanggulangan bencana banjir menjadi salah satu program penting dengan sasaran kami untuk meningkatkan upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.” (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang lebih lanjut menambahkan bahwa:

“Tingkat kepentingan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang terhadap penanggulangan banjir tentunya tinggi. Karena kan BPBD menjadi lembaga yang langsung membantu Walikota yaa, dalam pengurangan risiko bencana”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi dengan tingkat kepentingan yang tinggi dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini ditandai dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Kemudian dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ataupun efektif dan efisien.

3.1.2. Stakeholder Primer

Stakeholders primer dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Warga Kelurahan Tanjung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Adapun *stakeholders* primer menurut Handayani dan Warsono dalam (Talib, 2020) yaitu *stakeholders* yang terkena dampak secara

langsung, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mendapat manfaat dari kebijakan atau program. Kemudian mempunyai tanggung jawab dan kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut.

1. Warga Kelurahan Tanjung Mas

Warga Kelurahan Tanjung Mas (Masyarakat Kota Semarang) sebagai *stakeholders* primer merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung terhadap bencana banjir. Peristiwa banjir memberikan dampak negatif kepada warga berupa: kesulitan air bersih, terhambatnya aktifitas, kerugian ekonomi, masalah kesehatan dan dapat menyebabkan korban jiwa. Hal tersebut dijelaskan Warga Kelurahan Tanjung Mas sebagai informan 6, bahwa:

“Tentunya terkena dampak banjir. Mungkin contoh dampaknya saya mengalami kesulitan aktifitas, mau pergi-pergi susah. Kemudian jualan juga ga bisa. Dampaknya pendapatan kami saat banjir jadinya terhambat. Terus masyarakat juga ikut melaksanakan penanggulangan banjir. Kami sebagai masyarakat juga memberikan usulan dalam mengurangi risiko penanggulangan banjir kepada pemerintah. Kadang saya juga ikut sosialisasi dari pemerintah tentang banjir” (Wawancara dengan Warga Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 7 Agustus 2023)

Warga Kelurahan Tanjung Mas sebagai *stakeholders* primer juga harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan penanggulangan bencana banjir. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa masyarakat

memiliki kewajiban dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan Warga Kelurahan Tanjung Mas dalam penanggulangan banjir yaitu dengan upaya memberikan usulan dalam mengurangi resiko banjir ataupun upaya membuang sampah pada tempatnya serta membersihkan selokan di sekitar perumahan.

2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan bagian dari *stakeholders* primer. Sebagai *stakeholders* primer, Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengaruh dan kepentingan dalam meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum menjadi unsur pelaksana di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dalam penanggulangan bencana banjir berkaitan dengan permasalahan pada drainase. Dalam hal ini, bidang sumber daya air dan drainase mempunyai tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan seksi pengelolaan dan pengembangan drainase. Dalam penanggulangan bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Kota Semarang menjelaskan bahwa:

“Salah satu sasaran kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yaitu dengan adanya penurunan daerah genangan banjir. Hal tersebut kami lakukan dengan upaya seperti: kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase, kegiatan pembangunan, pengendalian, dan rehabilitasi pengembangan drainase ataupun kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase. Kegiatan tersebut dilakukan agar kawasan banjir

di Kota Semarang dapat menurun.” (Wawancara dengan Sub koordinator Operasi dan pemeliharaan Drainase DPU, tanggal 8 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum berupaya menjadikan Kota Semarang sebagai kawasan bebas banjir dengan langkah berupa: kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase, kegiatan pembangunan, pengendalian, dan rehabilitasi pengembangan drainase ataupun kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase. Sehingga DPU menjadi *stakeholders* yang memiliki posisi dan peran yang penting dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam penanggulangan banjir, Dinas Pekerjaan Umum juga berupaya mengurangi kawasan banjir dengan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko banjir, seperti melakukan pembersihan drainase.



Gambar 3.1 Kegiatan Drainase
Sumber: Dokumentasi Instagram @dpukotasemarang (2023)

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam penanggulangan banjir dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT). UPDT mempunyai tugas untuk membantu sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan pompa banjir di wilayah kerjanya. Kemudian tugas dan UPDT termuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Tugas UPDT dalam penanggulangan banjir yaitu pelaksanaan dan pengoperasian pompa banjir di wilayah kerjanya, serta pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPDT pompa banjir.

3.1.3. *Stakeholders* Sekunder

Stakeholders sekunder dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dan Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas. Adapun *stakeholders* sekunder menurut Handayani dan Warsono dalam (Talib, 2020) yaitu *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

1. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) merupakan unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. BBWS Pemali Juana memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air yang optimal di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, BBWS Pemali Juana juga menjadi salah satu *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir, terutama di Kota Semarang. Adapun BBWS Pemali Juana menjelaskan keterlibatannya dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu:

“Tingkat kepentingan instansi dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terhadap penanggulangan banjir mempertimbangkan beberapa hal yaitu kewenangan dan tingkat darurat atau dampak luasan banjir tersebut. Apabila banjir terjadi di wilayah kerja BBWS Pemali Juana, maka penanggulangan akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juana. Namun jika banjir tersebut berdampak luas kepada masyarakat, maka BBWS Pemali Juana akan ikut melakukan penanganan.” (Wawancara dengan Pelaksana Teknik PKK Perencanaan dan Program BBWS Pemali Juana, tanggal 3 April 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, BBWS Pemali Juana memiliki peran dalam upaya penanggulangan bencana banjir dengan mempertimbangkan tingkat darurat atau dampak luasan banjir. BBWS Pemali Juana melaksanakan pekerjaan perencanaan dan penanganan banjir secara fisik, berupa: pembangunan bendungan, pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, stasiun pompa, dan kolam retensi. BBWS Pemali Juana bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Hal tersebut terjadi karena BBWS

Pemali Juana juga memiliki fungsi dalam mengelola drainase utama perkotaan.

2. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang mempunyai tugas dalam bidang penataan ruang dan bidang pertanahan. Selain itu, distaru berperan aktif dalam pembangunan Kota Semarang. Dalam penanggulangan bencana banjir, distaru berperan dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pemanfaatan tata ruang dapat berjalan secara optimal apabila terjadi peningkatan kepemilikan IMB. Bangunan yang ber IMB menjadi salah satu upaya dalam pengurangan risiko banjir. Oleh karena itu, distaru menjadi salah satu *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir. Dinas Penataan Ruang menjelaskan bahwa:

“Dalam penanggulangan banjir tentunya kami ikut berperan, salah satunya terlibat dalam hal perencanaan. Dalam hal tersebut dituangkan dalam peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang”. (Wawancara dengan Pegawai Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Penataan Ruang, tanggal 11 Mei 2023).

Keterlibatan Dinas Penataan Ruang dalam penanggulangan banjir yaitu dengan memberikan pelayanan berupa Keterangan Rencana Kota (K RK). Penggunaan K RK bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan suatu bidang lahan sehingga menjadi persyaratan dalam mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan yang tidak memiliki IMB dapat memicu terjadinya banjir sehingga diperlukan pemberdayaan oleh

pemerintah kepada masyarakat di Kota Semarang. Kemudian dalam penanggulangan banjir, peran Dinas Penataan Ruang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Adapun program yang termuat dalam peraturan tersebut yaitu prasarana sumber air dalam sistem pengendalian banjir. Sistem pengendalian banjir yang dikelola oleh distaru, seperti: embung pada sub sistem drainase sungai silandak, madukoro, dan kanal timur.

3. Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas

Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu daerah yang tergabung dalam Kelurahan Siaga Bencana. Kelurahan mempunyai kemampuan dalam mengenali ancaman dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan risiko bencana. Kelurahan memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas menjadi *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

“Sebagai daerah yang terdampak bencana banjir, tentu saja pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan ikut dalam penanggulangan banjir. Saat terjadi banjir biasanya kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat”.

(Wawancara dengan Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 11 Mei 2023).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kelurahan ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir dengan upaya mendirikan dapur umum saat terjadinya bencana banjir. Selain itu kelurahan tanjung mas bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang dalam relokasi posko banjir serta paket bantuan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.2 Penyerahan Paket Sembako di Tambak Mulyo RW 15 Tanjung Mas

Sumber: Dokumentasi Instagram @keltanjungmas (2023)

Keluaran dalam penanggulangan bencana juga tercantum dalam Peraturan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Adapun tujuan khusus pengembangan kelurahan tangguh bencana yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu;

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya bencana dari dampak yang merugikan.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumberdaya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana.
3. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan.

3.2. Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Dalam penelitian ini, peran *stakeholders* dianalisis menggunakan teori Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) yang dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: *Policy Creator*, *Coordinator*, *Facilitator*, *Implementor*, dan *Accelerator*. *Policy Creator* merupakan peran *stakeholders* sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Kemudian koordinator merupakan peran *stakeholders* dalam mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat. Selanjutnya terdapat peran fasilitator yang berupaya memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Kemudian terdapat implementor sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Akselerator merupakan *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Peran menurut Soekamto dalam (Handayani & Warsono, 2017) adalah sebuah sistem ketika seseorang memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya keterlibatan dari *stakeholders*. Adapun *stakeholders* yang terlibat dalam

pelaksanaan penanggulangan banjir, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Warga di Kelurahan Tanjung Mas.

3.2.1. *Policy Creator*

Policy Creator atau pembuat kebijakan menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan tindakan *stakeholders* dalam memenuhi tugas dan wewenangnya untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. *Stakeholders* yang berperan sebagai policy creator dalam penanggulangan bencana banjir yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Adapun menurut dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, tugas dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.

Berdasarkan apa yang telah peneliti temukan pada dokumen tersebut, dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, bahwa:

“Kami tentunya ikut dalam pengambilan keputusan sebagai pihak yang membawahi kebijakan tersebut, salah satunya itu dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, kemudian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan kebijakan. Nanti juga kan berdasarkan kebijakan BPBD ada program-program penanggulangan bencana. Karena kan memang sasaran kami tentang kebencanaan ya”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam wawancara menerangkan bahwa mereka juga ikut terlibat sebagai *policy creator* dalam penanggulangan bencana banjir yang menjadi fokus dari penelitian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *policy creator* memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana dan peraturan tersebut menjadi tanda bahwa BPBD menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sebagai sistem umum kebijakan pembangunan daerah.

Kebijakan terkait penanggulangan bencana secara nasional di bentuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang menetapkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana di Indonesia, terutama di Kota Semarang. Kemudian pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai *policy creator dalam* penanggulangan bencana di Kota Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam mengambil keputusan atau penentu suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

3.2.2. Koordinator

Koordinator menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan tindakan *stakeholders* dalam mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat. *Stakeholders* yang berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana banjir yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Adapun menurut dalam Peraturan Walikota Nomor

122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, tugas dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, yaitu:

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Badan Penanggulangan bencana daerah Kota Semarang menjelaskan lebih lanjut, bahwa:

“Dalam penanggulangan bencana banjir, kami berkoordinasi dengan banyak pihak, baik itu pra bencana, saat terjadinya bencana, ataupun pasca bencana. Salah satunya itu untuk penanggulangan banjir kami berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana untuk penyediaan pompa air. Untuk rencana aksi daerah memang belum ada tapi koordinasi biasanya melalui rapat. Biasanya ada banyak yang tergabung dalam forum, contohnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana tadai. Kemudian juga ada Dinas Penataan Ruang dan dari Kelurahan”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Pernyataan wawancara tersebut sesuai dengan temuan studi pustaka yang dilakukan peneliti, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melakukan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan

bencana banjir di Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berkoordinasi dengan beberapa *stakeholders*, diantaranya yaitu: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kelurahan terkait bencana (Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Masyarakat Kota Semarang (Warga Kelurahan Tanjung Mas).

Peran koordinasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga termuat dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2021-2026, yang menyebutkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melalui rapat forum pengurangan resiko bencana.



Gambar 3.3 Monitoring dan Evaluasi FPRB

Sumber: BPBD (2023)

Koordinasi pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Semarang terkait penanggulangan banjir membutuhkan pihak ketiga, sehingga alur yang panjang menghambat produktivitas pelaksanaan penanggulangan (Indriyan & Hariani, 2015). Hal tersebut sejalan dengan wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Kalau hambatan ga ada, tapi mungkin kan tiap instansi memiliki SOP masing-masing jadi ada kepentingan atau prioritasnya masing-masing. Kalau BPBD kan terus melaksanakan koordinasi”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menyambungkan informasi, setiap instansi memiliki SOP masing-masing sehingga kepentingan masing-masing instansi saling terbentur. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya kesepahaman tugas yang akhirnya berdampak pada belum adanya Rencana Aksi Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan teori Nugroho, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Kemudian didukung oleh pernyataan Informan 1 yang menyebutkan bahwa BPBD melakukan koordinasi dengan beberapa *stakeholders*.

3.2.3. Fasilitator

Fasilitator menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan peran stakeholders sebagai pihak yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Peristiwa banjir yang sering terjadi di Kota Semarang merugikan banyak pihak sehingga harus ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pemerintah juga harus memenuhi apa yang dibutuhkan baik sebelum atau sesudah terjadinya bencana banjir. Fasilitator memiliki dukungan anggaran sehingga pengembangan sarana dan prasarana pada penanggulangan bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Dalam proses penanganan bencana banjir, berdasarkan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menyebutkan bahwa:

“Untuk fasilitas, leadernya dari Dinas Pekerjaan Umum. Di mana DPU akan memfasilitasi seperti: pompa, pengadaan alat berat ataupun penyelenggaraan swakelola saluran air. Namun karena anggaran terbatas ya, sehingga ada beberapa kegiatan yang diprioritaskan”. (Wawancara dengan Sub koordinator Operasi dan pemeliharaan Drainase DPU, tanggal 8 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan *leader* dalam memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dengan upaya: pengadaan pompa dan alat berat ataupun penyelenggaraan swakelola saluran air. Dalam penanggulangan bencana

banjir, Dinas Pekerjaan Umum juga bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Peran fasilitator yang dilakukan secara bersama yaitu dalam pengadaan sistem rumah pompa dan drainase, di mana BBWS Pemali Juana memfasilitasi wilayah banjir yang menjadi wilayah kerjanya. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum melakukan penambahan fasilitas berupa pompa dan pintu air.



Gambar 3.4 Infrastruktur Rumah Pompa Sringin di Kota Semarang

Sumber: Dokumentasi Instagram @pupr_sda_pamalijuana (2023)

Peran fasilitator juga dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan memberikan bantuan berupa pemberian air bersih.



Gambar 3.5 Pemberian Bantuan Air Bersih

Sumber: Dokumentasi Instagram @bpbdkotasemarang (2023)

Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang juga memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dengan adanya Keterangan Rencana Kota (K RK). Keterangan Rencana Kota merupakan sebuah peta yang memiliki keterangan secara rinci tentang pemanfaatan suatu kawasan tanah. Program keterangan rencana kota ini mengakomodir mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang di suatu lokasi. Sehingga K RK menjadi dasar dari persetujuan bangunan gedung atau yang biasa dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kawasan yang tidak memiliki IMB berdampak pada rusaknya daerah resapan sehingga dapat menyebabkan banjir

(www.halosemarang.id, 2023). Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Penataan

Ruang bahwa:

“Bidang tata ruang ini kita ada namanya dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK). KRK mengakomodir mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang di suatu lokasi yang diajukan oleh pemohon itu. KRK ini nanti menjadi dasar persetujuan bangunan gedung atau yang dikenal dengan nama IMB”. (Wawancara dengan Pegawai Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Penataan Ruang, tanggal 11 Mei 2023).

Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga melaksanakan peran fasilitator dengan upaya mendirikan dapur umum saat terjadinya bencana banjir. Kemudian, pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga mendapatkan bantuan fasilitas saat terjadi banjir oleh instansi lainnya, seperti: bantuan sembako dari Baznas, bantuan karung pasir dari Dinas Pekerjaan Umum, dan bantuan tenda pengungsian dari Badan penanggulangan Bencana Daerah. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Kelurahan Tanjung Mas yang menyebutkan, bahwa:

“Ketika terjadi banjir kelurahan akan memfasilitasi untuk dapur umum. Kemudian ada juga fasilitas dari pihak lainnya yang diberikan ke kelurahan, seperti: Baznas bantuan berupa sembako, Dinas Pekerjaan Umum berupa karung yang berisi pasir, dan BPBD mendirikan tenda pengungsian”. (Wawancara dengan Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 11 Mei 2023).

Selain keterlibatan kelurahan, masyarakat Kota Semarang juga ikut terlibat dalam memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dalam menyediakan sarana dan prasarana.. Berdasarkan wawancara dengan Warga Kelurahan Tanjung Mas, menyebutkan bahwa:

“Masayarakat ikut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana. Contohnya seperti menyediakan tempat sampah agar tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan selokan/got”. (Wawancara dengan Warga Kelurahan Tanjung Mas, 7 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang dilaksanakan oleh setiap stakeholders yang terlibat, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Warga Kelurahan Tanjung Mas. Sebagai fasilitator, menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) setiap stakeholders harus mampu mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya fasilitas yang menunjang penanggulangan banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memfasilitasi penanggulangan pra bencana berupa pemberian bantuan baik sembako ataupun air bersih. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mefasilitasi penyediaan pompa dan pintu air serta pengadaan alat berat. Dalam penanggulangan bencana banjir, Dinas Penataan Ruang melakukan peran fasilitator dengan pengadaan KRK. Kemudian pemerintah Kelurahan Tanjung Mas dan Warga Kelurahan Tanjung Mas berupaya memfasilitasi penanggulangan banjir dengan penyediaan tempat sampah dan pembersihan saluran.

3.2.4. Implementator

Implementor menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) yaitu *stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders* terkait. Dalam penanggulangan bencana yang *sustainable*, memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan dalam jumlah yang memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana memiliki beberapa kegiatan/program dalam meminimalisir terjadinya bencana banjir. BPBD menyebutkan bahwa:

“Untuk pengerjaan penanggulangan banjir secara fisik biasanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dan nantinya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD akan melakukan koordinasi dengan kedua instansi tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kami dari BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana banjir”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Peran Implementator yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam penanggulangan banjir yaitu dengan mengadakan sosialisasi kebencanaan. Adapun tujuan sosialisasi agar:

- a. Masyarakat tahu bagaimana cara menghindari bahaya banjir dan kerugian yang timbul tidak terlalu besar.

- b. Mengembangkan sikap masyarakat bahwa membuang sampah dan lain-lain di sungai adalah tidak baik dan akan menimbulkan permasalahan banjir.
- c. Menyadarkan masyarakat tentang kerusakan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh umat manusia, dapat mengakibatkan banjir yang lebih parah.



Gambar 3.6 Sosialisasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

Sumber: BPBD (2023)

Penyelenggaraan penanggulangan banjir juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan pada kegiatan rutinitas dan gawat kebencanaan. Kegiatan rutinitas yaitu melakukan pembersihan sampah pada saluran dan sedimen untuk memperluas penampang basah saluran. Sedangkan kegiatan gawat bencana akan melakukan kerjasama dengan semua pihak dari kelurahan setempat, kecamatan, BBWS Pemali Juana dan BPBD. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang menyebutkan, bahwa:

“Kita ada rutinitas dan gawat kebencanaan. Kalau dari saya kan seksi drainase ya. Jadi kita ada pembersihan saluran terus penggalian sedimen yang berguna untuk memperluas penampang basah saluran. Perbaikan saluran pada tahun 2023 ada di jl. Tentara Pelajar, jl. Ahmad Yani, Klipang, Kelurahan Jatisari, dan Tlogosari. Tapi kalau terjadi keadaan darurat bencana, biasanya kita kerjasama dengan semua kelurahan setempat, kecamatan, BBWS, dan BPBD kadang juga ikut” (Wawancara dengan Sub koordinator Operasi dan pemeliharaan Drainase DPU, tanggal 8 Mei 2023).

Berikut adalah dokumentasi mengenai Program Pembersihan Sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.



Gambar 3.7 Penanganan Tepra terkait Pembersihan Sampah

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (2022)

Dinas Pekerjaan Umum juga melaksanakan normalisasi saluran di beberapa titik, terutama normalisasi saluran yang di atasnya terdapat pedagang kaki lima (PKL) atau warung. Pelaksanaan normalisasi akan berkerjasama dengan kelurahan setempat, di mana kelurahan akan mengadakan sosialisasi, sehingga akhirnya DPU dapat bertindak. Kelurahan juga bekerja sama dengan

BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.8 Bantuan Masyarakat Tangguh Bencana

Sumber: Dokumentasi Instagram (2022).

Ketika bencana banjir terjadi, Kelurahan Tanjung Mas menjadi penyambung bantuan dari berbagai pihak, salah satunya bantuan dari BPBD yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat. Selanjutnya kelurahan juga melaksanakan sosialisasi mengenai pembuangan sampah, keamanan pada saat banjir, dan mengadakan pos jaga di RW 15 setiap malamnya.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang biasanya akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kedua instansi tersebut melaksanakan peran implementor pada penanggulangan banjir dengan cara, seperti: pengerukan sedimentasi, pembuatan tanggul, pembangunan

bendungan, kolam retensi, dan embung sebagai pengendali banjir. Selain itu juga melakukan perkuatan tebing sungai-sungai yang kritis. Adapun kegiatan yang telah dan sedang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (2020-2022), yaitu:

- a. Penanganan Sungai Bringin (4.25 km)
- b. Penanganan Sungai Babon (3100 m)
- c. Penanganan Sungai Penggaron (300 m)
- d. Penanganan Tanggul Sungai hilir Sringin
- e. Kolam Retensi Kawasan Industri Terboyo Semarang
- f. Pembuatan Rumah Pompa Banjardowo



Gambar 3.9 Pengendalian Banjir dan Rob Kawasan Tambaklorok 2022-2024

Sumber: BBWS Pemali Juana (2023)

Dinas Penataan Ruang sebagai salah satu *stakeholders* yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kota Semarang juga

melaksanakan kegiatan/program sesuai dengan bidangnya. Dinas Penataan Ruang akan mengawasi daerah terutama yang berada di pesisir karena terdapat pembatasan bangunan. Pembatasan bangunan ini mengacu pada KRK di mana terdapat 3 kecamatan yang menjadi daerah penyangga, yaitu Ngaliyan, Gunung Pati dan Mijen. Kecamatan tersebut memiliki IMB sebanyak 40%, sedangkan daerah lainnya sebanyak 60%. Hal tersebut bertujuan agar hujan tidak langsung turun ke daerah bawah. Kemudian implementasi penanggulangan banjir tidak terlepas dari peran masyarakat. Di mana masyarakat melakukan gotong royong membersihkan saluran pembuangan air. Hal tersebut disampaikan oleh Warga Kelurahan Tanjung Mas sebagai informan 6, bahwa:

“Seperti yang dikatakan tadi, masyarakat biasanya melakukan gotong royong dengan membersihkan selokan”. (Wawancara dengan Warga Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 7 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran implementor dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* terkait, dalam hal ini yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Warga Kelurahan Tanjung Mas. Hal tersebut dibuktikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melakukan kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir.

Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana juga melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir terjadinya banjir, yaitu: melakukan pembersihan sampah, normalisasi saluran, pembuatan kolam penampung air, pembuatan tanggul pantai, pengerukan saluran drainase, pengelolaan pompa banjir. Kemudian Dinas Penataan Ruang melaksanakan peran implementor dengan melakukan pengawasan daerah dengan KRK, serta pengelolaan embung pada sub sistem drainase. Selanjutnya dari Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga mengadakan sosialisasi mengenai pembuangan sampah dan mengadakan pos jaga. Peran implementor juga dilaksanakan oleh Warga Kelurahan Tanjung Mas yaitu dengan melakukan gotong royong membersihkan saluran.

3.2.5. Akselerator

Akselerator menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Peristiwa bencana yang terjadi dapat mengancam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan secara cepat dan tepat. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir, setiap *stakeholders* yang terlibat berusaha memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga kegiatan atau program penanggulangan banjir

dapat meminimalisir terjadinya bencana banjir. Dalam hal ini BPBD menyebutkan bahwa:

“ Dalam mempercepat penanggulangan bencana, yang diperlukan awalnya yaitu perencanaan yang jelas dan terstruktur. Karena bencana bersifat darurat sehingga kami juga menyiapkan langkah-langkah atau pedoman saat terjadinya bencana. Kemudian dari BPBD juga ada EWS sehingga dapat mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan yang tepat”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang lebih lanjut menambahkan:

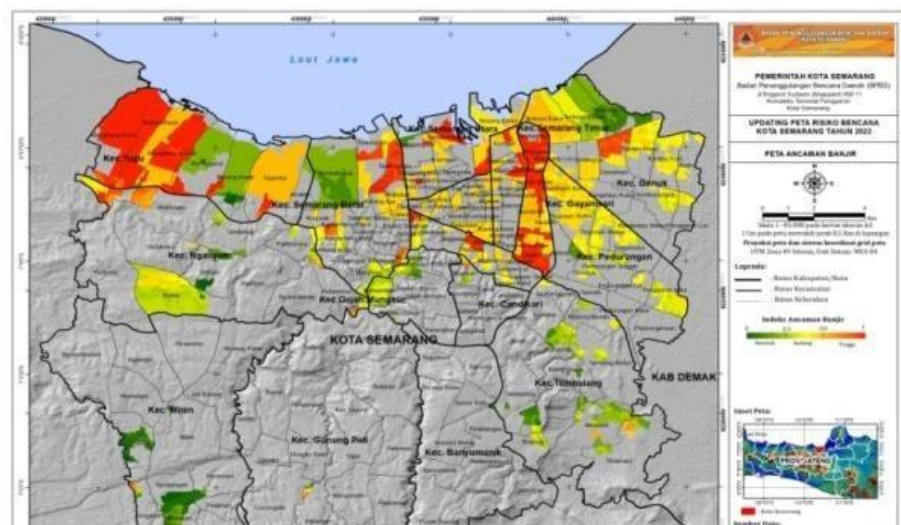
“Untuk prabencana, ada beberapa program meminimalisir yang dilakukan seperti Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan dini. Kemudian ada juga aplikasi Sipantau Bencana dan Semaris yang dapat di download pada playsote”. (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).



Gambar 3.10 Aplikasi siPantau

Sumber: BPBD (2023)

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memanfaatkan teknologi dalam upaya penanggulangan banjir. Teknologi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelenggaraan penanggulangan banjir. Dengan teknologi, *stakeholders* dapat mengevaluasi situasi darurat. Pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana banjir diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk *Early Warning System* (EWS) dan Sipantau bencana. Kemudian dengan adanya teknologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi banjir. Berikut adalah dokumentasi mengenai Peta persebaran daerah yang menjadi ancaman banjir.



Gambar 3.11 Peta Ancaman Banjir di Kota Semarang
Sumber: BPBD (2023)

Dalam mempercepat kegiatan penyelenggaraan penanggulangan banjir, setiap instansi akan menerima laporan atau aduan dari masyarakat

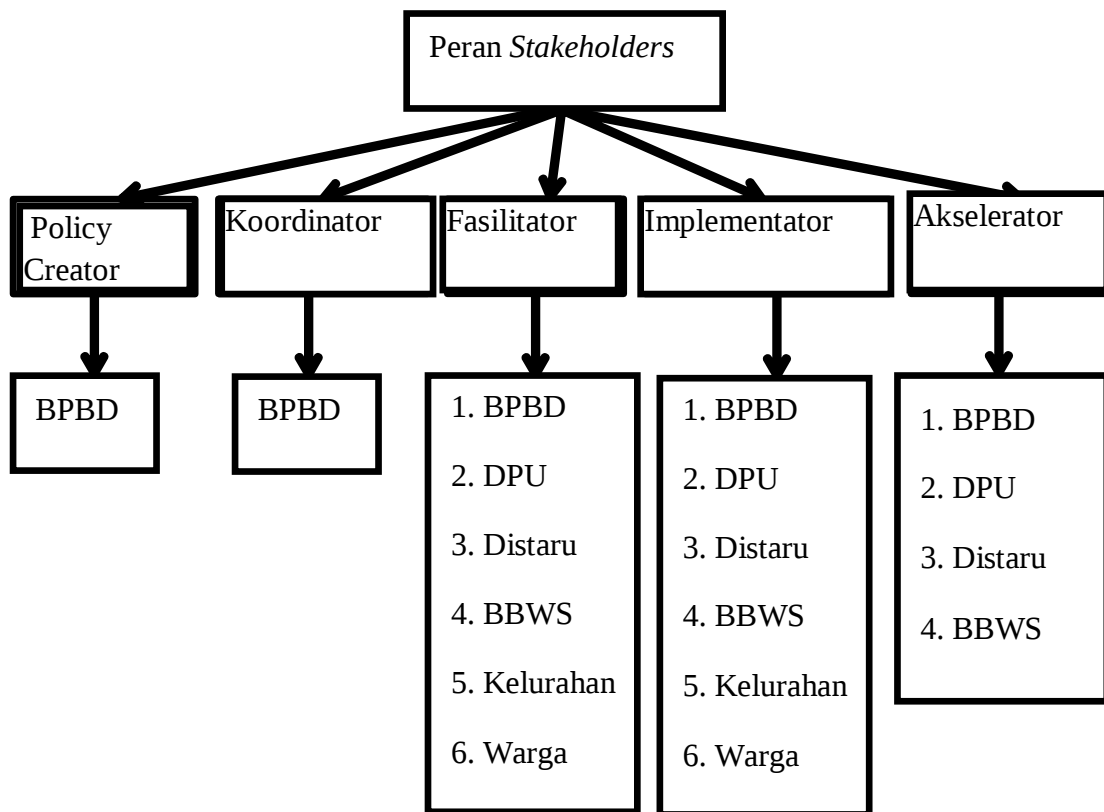
sehingga kegiatan atau program terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Adapun dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Penatan Ruang Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan menerima aduan masyarakat melalui Layanan *Online* yang dapat diakses melalui website. Namun tidak semua *stakeholders* dapat menerapkan peran akselerator. Dalam wawancara dengan Kelurahan Tanjung mas diketahui bahwa aduan masyarakat tidak memiliki layanan secara online. Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat bahwa:

“Dalam mempercepat penanggulangan banjir, kami masyarakat akan menyalurkan aspirasi kepada pihak RT atau RW terlebih dahulu. Untuk laporan secara online saya tidak tau alurnya bagaimana sehingga aduan akan kami sampaikan kepada RT/RW”. (Wawancara dengan masyarakat Kota Semarang, 7 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua *stakeholders* melaksanakan peran akselerator. Adapun *stakeholders* yang berperan sebagai akselerator yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. BPBD berperan aktif dalam mempercepat program penanggulangan bencana banjir, yaitu dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana yang dapat diakses oleh masyarakat secara *online*. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak paham tentang layanan pemerintah secara *online* sehingga tujuan

akselerator belum dapat tercapai. Kemudian pemerintah Kelurahan Tanjung Mas tidak menyediakan pelayanan secara *online*.

Peran *stakeholders* menurut Nugroho (2014) dalam penanggulangan bencana banjir, meliputi: *Policy creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, Akselerator.



Gambar 3.12 Bagan Hubungan Antar *Stakeholders*

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Adapun peran *stakeholders* lebih lanjut disajikan dalam bentuk tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.2 Analisis Peran *Stakeholders* dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang

Peranan	<i>Stakeholders</i>	Kegiatan terkait peran	Analisis penilaian
<i>Policy Creator</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan penanggulangan bencana 2. Terlibat dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana	BPBD sebagai pihak yang langsung membawahi kebijakan penanggulangan bencana menjadi penyambung arah kebijakan dalam implementasi rencana strategis. Tugas dan fungsi tersebut termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Hambatan sebagai <i>policy creator</i> yaitu hampir tidak ada namun diperlukan pemahaman isi kebijakan oleh perangkat daerah terkait.
Koordinator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> lainnya yang terlibat dalam penanggulangan banjir 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengurangan resiko	BPBD berperan mengkoordinasikan <i>stakeholders</i> yang terlibat. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya kesepahaman tugas antar <i>stakeholders</i> . Kemudian kesulitan dalam menyambungkan informasi karena terkait dengan SOP masing-masing instansi. Selain Itu, masyarakat masih

		bencana	melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terlebih dahulu.
Fasilitator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Bantuan Sembako 2. Bantuan Air Bersih	Peran fasilitator oleh BPBD dalam penanggulangan banjir diperuntukkan untuk pasca bencana.
	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	1. Penyediaan pompa dan pintu air 2. Pengadaan alat berat	Peran fasilitator dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan tujuan mengurangi bencana banjir di Kota Semarang. Hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan anggaran dalam pemenuhan fasilitas penanggulangan bencana.
	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Menyediakan material banjiran/pompa air	BBWS Pemali Juana hanya memfasilitasi wilayah banjir yang menjadi wilayah kerja BBWS Pemali Juana.
	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Penyediaan Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas penataan Ruang melakukan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan KRK. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang KRK dan IMB sehingga menyebabkan rusaknya daerah resapan.

	Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas	Penyediaan dapur umum ketika terjadinya bencana banjir	Peran fasilitator pada kelurahan Tanjung Mas berupa pendirian dapur umum dan tindakan pemerintah Kelurahan sebagai penyalur bantuan pada saat terjadinya bencana.
	Warga Kelurahan Tanjung Mas	1. Menyediakan tempat sampah 2. Menyediakan sarana prasarana dalam membersihkan got/saluran.	Masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penanggulangan banjir. Hambatan yang terjadi yaitu masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Implementor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Melakukan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir	BPBD dalam melaksanakan peran sebagai implementor telah beberapa kali melakukan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di Kota Semarang.
	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	1. Melakukan pembersihan sampah 2. Normalisasi saluran 3. Pembuatan kolam penampung air 4. Pembuatan tanggul pantai	Dinas Pekerjaan umum sebagai implemenator melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun hambatan Dinas PU sebagai implementator yaitu keterbatasan anggaran.

		5. Pengerukan saluran drainase 6. Pengelolaan pompa banjir	
	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	1. Pengerukan sedimentasi 2. Penanganan tanggul 3. Pembuatan kolam retensi 4. pembuatan rumah pompa	Pelaksanaan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh BBWS Pemali Juana hampir tidak ada kendala.
	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	1. Melakukan pengawasan daerah dengan KRK 2. pengelolaan embung pada sub sistem drainase	Penanggulangan banjir dilaksanakan Distaru dengan upaya pengembangan KRK. Namun kurangnya sosialisasi KRK secara menyeluruh kepada masyarakat di Kota Semarang.
	Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas	1. Sosialisasi mengenai pembuangan sampah 2. Mengadakan pos jaga.	Adapun hambatan yang terjadi yaitu kurangnya inisiatif kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penanggulangan banjir.
	Warga Kelurahan Tanjung Mas	1. Gotong royong membersihkan saluran pembuangan air.	Masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana
Akselerator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. . Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan bencana	Hambatan yang terjadi yaitu berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan

	Kota Semarang	2. Sipantau Bencana.	banjir. Masih terdapat masyarakat yang melakukan pengaduan kepada RT/RW setempat. Sedangkan layanan online telah disediakan oleh pemerintah untuk mempercepat aduan dari masyarakat. Sehingga hal ini berdampak pada alur koordinasi yang panjang. Selain itu, masih terdapat kelurahan yang tidak memiliki layanan secara <i>online</i> .
	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Pemetaan saluran darinase yang bermasalah	
	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Aduan masyarakat melalui <i>Helpdesk Online</i>	
	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Aduan masyarakat melalui <i>Helpdesk Online</i>	

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

3.3. Faktor pendukung dan Penghambat Peran Stakeholders dalam

Penanggulangan Bencana Banjir

Analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di kota semarang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Dalam penelitian Destiana, dkk (2020) menyebutkan bahwa terdapat 4 unsur yang mempengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung peran *stakeholders* yaitu: nilai, kepercayaan dan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat peran *stakeholders* yaitu komunikasi. Setiap unsur tersebut mempengaruhi pencapaian sasaran atau tujuan pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

3.3.1. Faktor Pendukung

a. Nilai

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal dengan adanya faktor pendukung berupa nilai-nilai yang diterapkan. Menurut Schwartz dalam (Dahriyanto, 2018) nilai merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda, serta menjadi prinsip panutan dalam entitas sosial. *Stakeholders* perlu memahami dan menerapkan nilai pada proses kegiatan penanggulangan bencana banjir. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan ke dalam budaya kerja yang dituangkan dalam maklumat pelayanan.

Penerapan nilai pada peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ASN. Nilai tersebut merupakan dasar dari Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam suatu persepsi umum sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ASN harus memiliki integritas, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

“Pada pelaksanaan penanggulangan banjir tentunya DPU melaksanakan sesuaidengan aturan kode etik. Agar terjadi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan terutama saat terjadinya bencana”. (Wawancara dengan Sub koordinator Operasi dan pemeliharaan Drainase DPU, tanggal 8 Mei 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa unsur nilai diterapkan dalam upaya penanggulangan banjir. Hal ini ditandai dengan penerepan nilai secara individual dan profesionalitas. Nilai individual merupakan penerapan dari aduan masyarakat sehingga *stakeholders* terkait dapat menanggapi permasalahan tersebut ketika mendapat lapoan dari masyarakat. Kemudian *stakeholders* dalam penyelenggaraan penanggulangan harus bekerja secara profesionalitas, di mana *stakeholders* melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, sehingga kegiatan atau pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efesien.

b. Kepercayaan

Stakeholders menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir. Sehingga hubungan yang terjalin memiliki peluang munculnya rasa percaya di antara *stakeholders* terkait. Penanggulangan bencana banjir dapat berjalan secara optimal dengan adanya kepercayaan antar *stakeholders*. Dalam hal ini, Ibu Sri Mumpuni selaku Warga Kelurahan Tanjung Mas menjelaskan bahwa:

“Saya percaya terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir, karena memang intensitas banjir di daerah saya menjadi berkurang. Hal itu karena dahulu ketika hujan, akan langsung banjir di depan jalan. Kemudian di depan rumah juga sudah dilakukan peninggian jalan”. (Wawancara dengan Warga Kelurahan Tanjung Mas, 7 Agustus 2023).

Penerapan nilai dan sikap dalam penanggulangan bencana banjir dapat menumbuhkan kepercayaan antar *stakeholders*. Kemudian instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana juga telah menerapkan keterbukaan dalam setiap informasinya yang dapat diakses pada website dinas terkait. Hal tersebut dapat memperlancar proses pada penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai fasilitator dan implementator dalam penanggulangan bencana banjir. Sehingga, unsur kepercayaan dapat

mendukung penanggulangan banjir berjalan secara optimal, serta memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu program kerja.

c. Kebijakan

Penanggulangan banjir oleh *stakeholders* terkait dalam pelaksanaannya juga berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan terkait penanggulangan bencana telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

3.3.2. Faktor Penghambat

a. Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, bahwa:

“Penanggulangan banjir harus berkoordinasi dengan pihak lainnya. Tetapi tentu saja terdapat beberapa permasalahan dalam melaksanakan kegiatan, salah satunya yaitu komunikasi yang tidak optimal. Peyaluran informasi dari

satu bidang ke bidang lainnya masih terdapat kesalahan informasi”. (Wawancara dengan Pelaksana Teknik PKK Perencanaan dan Program BBWS Pemali Juana, tanggal 3 April 2023).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjelaskan bahwa:

“Koordinasi terus dilaksanakan dengan beberapa instansi terkait. Namun dalam upaya koordinasi, setiap instansi memiliki SOP tersendiri sehingga terkadang terbentur dengan kepentingan masing-masing” (Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa setiap instansi berkoordinasi terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Namun dalam upaya koordinasi, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidaksepahaman. Kurangnya kesepahaman akhirnya menyebabkan sasaran dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang sulit untuk dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan permasalahan pada kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi antar instansi masing-masing. Kemudian setiap instansi memiliki kepentingan masing-masing sehingga kurangnya kesepahaman tugas antar *stakeholders*. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan tidak sinerginya tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholders*. Akhirnya berdampak pada belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mengurangi resiko bencana di Kota Semarang. Kemudian masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam aduan *online* sehingga alur koordinasi menjadi panjang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Identifikasi *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diambil kesimpulan bahwa *stakeholders* dalam penanggulangan banjir diidentifikasi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Stakeholders* utama (Primer).

Stakeholders primer pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Warga Kelurahan Tanjung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Warga Kelurahan Tanjung Mas merupakan *stakeholders* yang terdampak langsung bencana banjir. Kemudian dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengaruh dan kepentingan dalam meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum menjadi unsur pelaksana di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa BPBD memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ataupun efektif dan efisien.

3. *Stakeholders* sekunder

Stakeholders sekunder pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dan Pemerintahan Kelurahan Tanjung Mas. *Stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

4.1.2. Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diambil kesimpulan bahwa peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir dianalisis berdasarkan lima peran, yaitu: *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1. Policy Creator

Stakeholders yang melaksanakan peran sebagai *policy creator* yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa BPBD terlibat dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ataupun efektif dan efisien.

2. Koordinator

Peran koordinator dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai *stakeholders* utama dalam Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan agar dapat terencana, terpadu dan menyeluruh. Namun, pelaksanaan koordinasi mengalami permasalahan dalam penyebaran informasi yaitu alur koordinasi yang harus mengikuti SOP masing-masing instansi, sehingga menyebabkan terbenturnya kepentingan. Kemudian masih terdapat masyarakat yang melakukan koordinasi dengan pihak ketiga sehingga alur koordinasi menjadi panjang dan lambat.

3. Fasilitator

Peran fasilitator dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan oleh seluruh stakeholders terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memfasilitasi penanggulangan pasca bencana berupa: bantuan sembako dan bantuan air bersih. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana memfasilitasi penyediaan pompa dan pintu air serta pengadaan alat berat. Dalam penanggulangan bencana banjir, Dinas Penataan Ruang melakukan peran fasilitator dengan pengadaan KRK. Kemudian pemerintah Kelurahan Tanjung Mas dan Warga Kelurahan Tanjung Mas berupaya memfasilitasi penanggulangan banjir dengan penyediaan tempat sampah dan pembersihan saluran.

4. Implementor

Stakeholders sebagai implementor dalam penanggulangan banjir melaksanakan kegiatannya dengan baik. Hal tersebut dilihat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melakukan kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir terjadinya banjir, yaitu: melakukan pembersihan sampah, normalisasi saluran, pembuatan kolam penampung air, pembuatan tanggul pantai, pengerukan saluran drainase, pengelolaan pompa banjir. Kemudian Dinas Penataan Ruang melaksanakan peran implementor dengan melakukan pengawasan daerah dengan KRK, serta pengelolaan embung pada sub sistem drainase.

Selanjutnya dari Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga mengadakan sosialisasi mengenai pembuangan sampah dan mengadakan pos jaga. Peran implementor juga dilaksanakan oleh Warga Kelurahan Tanjung Mas yaitu dengan melakukan gotong royong membersihkan saluran.

5. Akselerator

Akselerator meliputi peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar penanggulangan bencana dapat diminimalisir dengan efektif dan efisien. Dalam bencana banjir di Kota Semarang, Badan penanggulangan Bencana Daerah melakukan peran akselerator dengan upaya Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan bencana dan Sipantau Bencana. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum memberikan kontribusi dengan cara melakukan pemetaan saluran drainase yang bermasalah.. Selanjutnya dari Dinas penataan Ruang Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana memanfaatkan layanan online untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan membuat aduan melalui *Helpdesk Online*. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak paham dengan penggunaan pelayanan *online* serta Kelurahan Tanjung Mas juga tidak memberikan pelayanan *online*.

4.1.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir diidentifikasi berdasarkan:

1. Faktor Pendorong

- a. Nilai: Penerapan nilai dalam penanggulangan banjir diterapkan juga berdasarkan nilai individual dan profesionalitas. Nilai individual dilaksanakan dari penerapan layanan online, sehingga masyarakat dapat langsung memberikan aduan kepada *stakeholders* terkait. Kemudian *stakeholders* dalam penyelenggaraan penanggulangan harus bekerja secara profesionalitas, di mana *stakeholders* melaksanakan tugasnya dalam penanggulangan banjir secara bertanggung jawab.
- b. Kepercayaan: dilihat dari hubungan antar *stakeholders* yang terjalin sehingga menimbulkan rasa percaya. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari peran pemerintah yang berupaya meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang.
- c. Kebijakan: kebijakan mengenai penanggulangan telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

2. Faktor Penghambat: Komunikasi menjadi penghambat peran *stakeholders* dalam melaksanakan penanggulangan banjir. Komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* masih terdapat kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi antar instansi masing-masing. Kemudian kurangnya kesepahaman antar *stakeholders* menyebabkan terputusnya kepentingan masing-masing instansi..

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat peneliti berikan guna memberikan masukan untuk *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *stakeholders* utama dalam koordinasi perlu dapat meningkatkan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Pemerintah perlu merumuskan rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana. Hal tersebut dilakukan agar tidak terbenturnya kepentingan antar masing-masing *stakeholders*. Sehingga kesepahaman tugas antar *stakeholders* dapat tercapai.

3. Masyarakat dapat lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami pedoman dalam pelayanan online. Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan dan koordinasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

Keputusan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Buku

Keban, Yermias T.. 2014. “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori, dan Isu”. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Moleong, Lexy J., 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widodo, Joko. 2018. Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative

Jurnal

Agani, Muh Hasbi Azis, ect. 2020. “Local Government Strategies in Managing Flood Disaster in Tompobulu, Maros, Indonesia”. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 4(2): 1-8.

Anggara, B., Idris, A., & Hasanah, N. (2019). PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 879–890.

Anggraini, Dewi. 2007. Analisis Berbasis Masyarakat Mengatasi Banjir Perkotaan : Studi Kasus di Semarang, Indonesia.

- Carter, W. Nick. 2008. "Disaster management: a disaster manager's handbook". Philippines: Asian Development Bank
- Dahriyanto, Luthfi Fathan, et al. 2018. "Intensi Perilaku Pro-Konservasi Ditinjau dari Orientasi Nilai Individu Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang." *JURNAL PSIKOLOGI ILMIAH* 10(2): 180–91.
- David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti dan Budi Puspo Priyadi. 2019. "Stakeholders Analysis dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima." 7(2): 245–58.
- Destiana, Riska, Kismartini, dan Tri Yuningsih. 2020. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau". *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 8(2): 132-153.
- E., Durham, dkk. 2014. "The BiodivERsA Stakeholders Engagement Handbook". BiodivERsA, Paris
- Edi, Kurniawan, dan Erni Suharini. 2021. Bencana Banjir di Kota Semarang dari Kolonial Hingga Reformasi. *Jurnal Studi Sejarah* Volume 31, Nomor 2Keban, Yermias T.. 2014. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Erlani, R., & Nugrahandika, W. H. (2019). Ketangguhan Kota Semarang dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut (Rob). *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.47-63>
- Hadi, Sudharto P. 2017. In Search for Sustainable Coastal Management: A Case Study of Semarang, Indonesia. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 55 012054
- Heryati, S. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146.
- Hidayah, Ni A et al. 2019. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran Stakeholders Dibutuhkan Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Pembangunan Termasuk Pembangun." *Jurnal Administrasi Publik* 7(1): 55–71.
- Isa, Muzakar, dan Liana Mangifera. 2017. "Analisis Stakeholders dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten". Universitas Muhamamdiyah Surakarta
- Isa, Muzakar, dkk. 2013. "Strategi Penguatan Kapasitas Stakeholders dalam Adaptasi Dan Mitigasi Banjir Di Kota Surakarta". *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 17(2):

99-110.

Indriyan, I., & Hariani, D. (2015). “ Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(4).

International Finance Corporation. 2007. “Stakeholders Engagement : A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets.” *International Finance Corporation*: 201. <http://www.ifc.org/>.

Kharimah, Islamia, et al. 2021. “Upaya Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Untuk Mendukung Keamanan Nasional.” *PENDIPA Journal of Science Education* 6(1): 57–63.

Kurniawan, Lilik. 2003. “Kajian Banjir Rob Di Kota Semarang (Kasus: Dadapsari).” *alami* 8(2): 54–59.

Kurniawati, Wakhidah, and Djoko Suwandono. 2015. “Pengaruh Bencana Banjir Dan Rob Terhadap Ketahanan Ekonomi Kawasan Perdagangan Johar Di Kota Semarang.” 1(4): 371–80.

Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(2), 502–518. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/20242>

Mariana, D., Paskarina, C., & Nurasa, H. (2010). Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia: Revitalisasi Administrasi Negara. *Graha Ilmu*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=p3X-LMcAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=p3X-LMcAAAAJ:17ZO-CJnx_8C

Masyhuri, Aziz et al. 2021. “Kolaborasi Antar Stakeholdersss Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang.” *Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)* 4(2): 854–62.

Muslimah, 2017. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Pengendalian Kerusakan Hutan Bakau di Kabupaten Kepulauan Meranti). Volume. 4 No. 1 Februari 2017.

Nur, Mohamad Ichsana. 2022. “Analisis Stakeholdersss Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Magelang.” *Journal of Public Administration and Local Governance* 6(2): 155–65.

Pasolong, Harbani. 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

- Permanahadi, A., & Widowati, E. (2022). Mitigasi bencana banjir di kota semarang. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 225–235. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Pujiastuti, Ratih. 2015. “Pengaruh Land Subsidence terhadap Genangan Banjir dan Rob di Semarang Timur”. *Jurnal MKTS* 21(1): 1-12.
- Purnomo, Edi dan Hadi Wahyono. 2019. Measuring Institutional Collaboration on Coping Flood and Rob in Panjang Baru Village Pekalongan City. Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University
- Qomariah, Jamiah. 2014. “Pengaruh Efikasi Diri dan Kepercayaan Terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 5(2): 806–15.
- Sari, Annisa Novita, Adi Susilo, dan Edi Susilo. 2013. The Role of Stakeholders in Flood Management: Study at Ponorogo, Indonesia”. *The International Journal Of Engineering And Science* 2(10): 1-10.
- Setiawan, Beny, dan Herbasuki Nurcahyanto. 2020. “Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(2).
- Subiyakto, Rudi, dkk. 2019. “Implementation Flood Disaster Policy base Community in Cilacap Regency, Central Java Province”. *Prizren Sosial Science Journal* 3(2): 50-55.
- Suleman, S. A., Apsari, N. C., & Bencana, M. (2007). *Peran Stakeholders dalam Manajemen Bencana Banjir*. 4(1), 1–140.
- Talib, D. (2020). *ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA*. 3(1), 12–18.
- Vidia Reski Awalia, Mappamiring, A. N. A. (2015). Peran pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di kabupaten kolaka utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, V(2), 202–213.
- Widyanti, Putri, Kismartini, dan Maesaroh. 2014. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Proyek Normalisasi Banjir Kanal Barat

dan Kali Garang Kota Semarang). *Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 3, Nomor 3

Zahirah Zahrah, Z. H. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN SIAGA BENCANA (KSB) DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 88–100.

Artikel Populer

Christiyaningsih (2022, 31 Oktober). Sinergi pertamina-BPBD-FPRB, Inisiasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Semarang
<https://news.republika.co.id/berita/rklwbc459/sinergi-pertaminabpbdprb-inisiasi-satuan-pendidikan-aman-bencana-di-semarang>

Iman, Afzal Nur. (2023, 21 Februari). Pemprov Jateng: Banjir di Semarang Dipicu Masalah Tata Ruang <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6580801/pemprov-jateng-banjir-di-semarang-dipicu-masalah-tata-ruang>

Utami, Kristi Dwi. (2023, 15 Mei). Hidup Berkelindan dengan Banjir dan Rob di Semarang <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/11/hidup-berkelindan-dengan-banjir-dan-rob-di-semarang>

Lampiran 1: Panduan Wawancara

Keterangan:

Informan 1: Winarsono, S.H. (Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)

Informan 2: Mochamad Hisam Ashari, ST (Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase)

Informan 3: Novi Permatasari, ST (Pelaksana Teknik PKK Perencanaan dan Program BBWS Pemali Juana)

Informan 4: Febrina S, S.Ars (Pegawai Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Penataan Ruang)

Informan 5: Abdul Kadir, S.E., M.M. (Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Mas)

Informan 6: Ibu Sri Mumpuni (Warga Kelurahan Tanjung Mas)

No.	Fenomena	Gejala	Pertanyaan	Informan					
				1	2	3	4	5	6
1.	Identifikasi <i>Stakeholders</i>	Kunci	Siapa yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir?	v					
		a. Kunci	Bagaimana kepentingan atau pengaruh <i>stakeholders</i> dalam penanggulangan bencana banjir.	v					
		b. Primer			v				v
		c. Sekunder				v	v	v	
2.	Peran <i>Stakeholders</i>	<i>Policy Creator</i>	Apakah <i>stakeholders</i> terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan pada penanggulangan bencana banjir?	v					
		Koordinator	Bagaimana hubungan antar <i>stakeholders</i> dalam melakukan koordinasi?	v					
		Fasilitator	Bagaimana peran <i>stakeholders</i> dalam memenuhi	v	v	v	v	v	v

			fasilitas penanggulangan banjir di Kota Semarang?						
		Implementor	Bagaimana bentuk upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh <i>stakeholders</i> ?	v	v	v	v	v	v
		Akselerator	Apa kontribusi <i>stakeholders</i> dalam upaya mempercepat penanggulangan bencana banjir	v	v	v	v		
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i>	Nilai	Bagaimana pengaruh nilai-nilai terhadap kelancaran penanggulangan banjir antar <i>stakeholders</i> ?	V	v	v	v	v	v
		Kepercayaan	Bagaimana pengaruh kepercayaan antar <i>stakeholders</i> dalam penanggulangan bencana banjir?	V	v	v	v	v	v
		Kebijakan	Apakah <i>stakeholders</i> berperan sesuai dengan kebijakan penanggulangan bencana?	V	v	v	v	v	v
		Komunikasi	Apakah terdapat permasalahan komunikasi antar <i>stakeholders</i> dalam penanggulangan bencana banjir?	V	v	v	v	v	v

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

No.	Fenomena	Gejala	Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Identifikasi Stakeholders	Stakeholders Kunci	Siapa yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir?	Informan 1: Penanggulangan banjir dari BPBD tentu bekerja sama dengan banyak pihak. Diantaranya itu ada dengan Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian kami dari BPBD dalam koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Bapeda, Dinas Penataan Ruang, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kuelurahan terkait, seperti itu.
		a. Stakeholders Kunci b. Stakeholders Primer c. Stakeholders Sekunder	Bagaimana kepentingan atau pengaruh stakeholders dalam penanggulangan bencana banjir.	Informan 1: Sesuai dengan tupoksi, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam upaya penanggulangan bencana banjir menjalankan peran sebagai koordinator. Komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait juga terus dilaksanakan. Untuk penanggulangan bencana banjir menjadi salah satu program penting dengan sasaran kami untuk meningkatkan upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.

				Informan 1: Tingkat kepentingan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang terhadap penanggulangan banjir tentunya tinggi. Karena kan BPBD menjadi lembaga yang langsung membantu Walikota yaa, dalam pengurangan risiko bencana. Informan 2: Salah satu sasaran kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yaitu dengan adanya penurunan daerah genangan banjir. Hal tersebut kami lakukan dengan upaya seperti: kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase, kegiatan pembangunan, pengendalian, dan rehabilitasi pengembangan drainase ataupun kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase. Kegiatan tersebut dilakukan agar kawasan banjir di Kota Semarang dapat menurun. Informan 3: Tingkat kepentingan instansi dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terhadap penanggulangan banjir mempertimbangkan beberapa hal yaitu kewenangan dan tingkat darurat atau
--	--	--	--	--

				dampak luasan banjir tersebut. Apabila banjir terjadi di wilayah kerja BBWS Pemali Juana, maka penanggulangan akan dilakukan oleh BBWS Pelamali Juana. Namun jika banjir tersebut berdampak luas kepada masyarakat, maka BBWS Pemali Juana akan ikut melakukan penanganan.” (Wawancara dengan Pelaksana Teknik PKK Perencanaan dan Program Informan 4: Dalam penanggulangan banjir tentunya kami ikut berperan, salah satunya terlibat dalam hal perencanaan. Dalam hal tersebut dituangkan dalam peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Informan 5: Sebagai daerah yang terdampak bencana banjir, tentu saja pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan ikut dalam penanggulangan banjir. Saat terjadi banjir biasanya kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Informan 6: Tentunya terkena dampak banjir. Mungkin contoh dampaknya saya mengalami kesulitan aktifitas, mau pergi-pergi susah.
--	--	--	--	---

				Kemudian jualan juga ga bisa. Dampaknya pendapatan kami saat banjir jadinya terhambat. Terus masyarakat juga ikut melaksanakan penanggulangan banjir. Kami sebagai masyarakat juga memberikan usulan dalam mengurangi risiko penanggulangan banjir kepada pemerintah. Kadang saya juga ikut sosialisasi dari pemerintah tentang banjir
2.	Peran <i>Stakeholders</i>	Policy Creator	Apakah <i>stakeholders</i> terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan pada penanggulungan bencana banjir?	Informan 1: Kami tentunya ikut dalam pengambilan keputusan sebagai pihak yang membawahi kebijakan tersebut, salah satunya itu dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, kemudian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan kebijakan. Nanti juga kan berdasarkan kebijakan BPBD ada program-program penanggulangan bencana. Karena kan memang sasaran kami tentang kebencanaan ya Informan 2: Untuk kebijakan darurat bencana kami hanya berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> lainnya. Kebijakannya bukan secara tertulis, akan tetapi koordinasi tentang pembagian

				tugas dalam penanggulangan bencana tersebut Informan 3: Untuk kebijakan kita belum ada yang secara khusus, tetapi BBWS Pemali Juana memiliki sistem mitigas Bencana dan sistem EWS terkait banjir. Kemudian untuk konversi sungai BBWS Pemali Juana mempunyai Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 terkait sempadan. Ini salah satu untuk menjaga kondisi badan sungai Informan 4: Untuk penanggulangan bencana banjir salah satunya ada perda RTRW terbaru Nomor 5 Tahun 2021 yang membahas mengenai penanganan bencana banjir dan rob. Saat ini kami juga sudah menerbitkan perwal tentang sempadan pantai untuk mengatur mengenai pengembangan di sekitar pantai apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Informan 5: Kelurahan dalam kegiatan penanggulangan banjir berpedoman pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, tetapi dari kelurahan biasanya memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan
--	--	--	--	---

				Informan 6: Untuk penanggulangan bencana banjir, terutama masyarakat lingkup RT/RW tidak ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi sebagai masyarakat bisa mengusulkan. Di mana usulan tersebut dituangkan dalam rapat pertemuan RT/RW. Contohnya usul peninggian jalan ataupun got atau saluran air dibersihkan
		Koordinator	Bagaimana hubungan antar stakeholders dalam melakukan koordinasi?	Informan 1: Dalam penanggulangan bencana banjir, kami berkoordinasi dengan banyak pihak, baik itu pra bencana, saat terjadinya bencana, ataupun pasca bencana. Salah satunya itu untuk penanggulangan banjir kami berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana untuk penyediaan pompa air. Untuk rencana aksi daerah memang belum ada tapi koordinasi biasanya melalui rapat. Biasanya ada banyak yang tergabung dalam forum, contohnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana tadai. Kemudian juga ada Dinas Penataan Ruang dan dari Kelurahan

				Informan 1: Kalau hambatan ga ada, tapi mungkin kan tiap instansi memiliki SOP masing-masing jadi ada kepentingan atau prioritasnya masing-masing. Kalau BPBD kan terus melaksanakan koordinasi Informan 3: Dalam melaksanakan penanggulangan banjir BBWS Pemali Juana selalu koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti: BPBD, DPU, pemkot, maupun Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) terkait. Koordinasi lebih ke teknis pelaksanaan. Namun, dalam koordinasi yang paling susah yaitu menyambungkan informasi. Informan 5: Koordinasi saat terjadi bencana biasanya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum, dan BAZNAS. Kemudian koordinasi untuk pra atau pasca bencana biasanya dengan kecamatan terkait
		Fasilitator	Bagaimana <i>stakeholders</i> memenuhi	peran dalam fasilitas Informan 1: Biasanya juga diadakan sosialisasi biar masyarakat paham akan kebencanaan

			penanggulangan banjir di Kota Semarang?	Informan 2: Untuk fasilitas, leadernya dari Dinas Pekerjaan Umum. Di mana DPU akan memfasilitasi seperti: pompa, pengadaan alat berat ataupun penyelenggaraan swakelola saluran air. Namun karena anggaran terbatas ya, sehingga ada beberapa kegiatan yang diprioritaskan Informan 3: BBWS menjadi penting dalam memfasilitasi penanggulangan bencana banjir karena menyediakan bahan atau material banjir/pompa air, ataupun alat berat. BBWS itu memfasilitasi manakala wilayah yang banjir menjadi wilayah kerja BBWS Pemali Juana. Informan 4: Bidang tata ruang ini kita ada namanya dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK). KRK mengakomodir mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang di suatu lokasi yang diajukan oleh pemohon itu. KRK ini nanti menjadi dasar persetujuan bangunan gedung atau yang dikenal dengan nama IMB Informan 5: Ketika terjadi banjir kelurahan akan
--	--	--	--	--

			memfasilitasi untuk dapur umum. Kemudian ada juga fasilitas dari pihak lainnya yang diberikan ke kelurahan, seperti: Baznas bantuan berupa sembako, Dinas Pekerjaan Umum berupa karung yang berisi pasir, dan BPBD mendirikan tenda pengungsian Informan 6: Masayarakat ikut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana. Contohnya seperti menyediakan tempat sampah agar tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan selokan/got
		Implementor	Bagaimana bentuk upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh stakeholders? Informan 1: Untuk pengerjaan penanggulangan banjir secara fisik biasanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dan nantinya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD akan melakukan koordinasi dengan kedua instansi tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kami dari BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana banjir Informan 2: Kita ada rutinitas dan gawat kebencanaan.

				Kalau dari saya kan seksi drainase ya. Jadi kita ada pembersihan saluran terus penggalian sedimen yang berguna untuk memperluas penampang basah saluran. Perbaikan saluran pada tahun 2023 ada di jl. Tentara Pelajar, jl. Ahmad Yani, Klipang, Kelurahan Jatisari, dan Tlogosari. Tapi kalau terjadi keadaan darurat bencana, biasanya kita kerjasama dengan semua kelurahan setempat, kecamatan, BBWS, dan BPBD kadang juga ikut Informan 3: Karena bidang saya perencanaan yakni dengan melaksanakan pekerjaan perencanaan dan penanganan banjir secara fisik. Secara teknis dengan melaksanakan pembangunan bendungan, kolam retensi, dan embung sebagai pengendali banjir. kemudian perkuatan tebing sungai-sungai yang kritis. Informan 4: Salah satunya tadi itu, mengawasi daerah terutama yang berada di pesisir karena terdapat pembatasan bangunan. Pembatasan bangunan ini mengacu pada KRK di mana terdapat 3 kecamatan yang menjadi daerah penyangga, yaitu Ngaliyan, Gunung Pati dan
--	--	--	--	--

			Mijen. Kecamatan tersebut memiliki IMB sebanyak 40%, sedangkan daerah lainnya sebanyak 60%. Informan 5: Ada kegiatan, seperti: melaksanakan sosialisasi mengenai pembuangan sampah, keamanan pada saat banjir dan mengadakan pos jaga di RW 15 setiap malamnya Informan 6: Seperti yang dikatakan tadi, masyarakat biasanya melakukan gotong royong dengan membersihkan selokan
		Akselerator	Apa kontribusi stakeholders dalam upaya mempercepat penanggulangan bencana banjir Informan 1: Dalam mempercepat penanggulangan bencana, yang diperlukan awalnya yaitu perencanaan yang jelas dan terstruktur. Karena bencana bersifat darurat sehingga kami juga menyiapkan langkah-langkah atau pedoman saat terjadinya bencana. Kemudian dari BPBD juga ada EWS sehingga dapat mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan yang tepat Informan 6: Dalam mempercepat penanggulangan banjir, kami masyarakat akan menyalurkan aspirasi

				kepada pihak RT atau RW terlebih dahulu. Untuk laporan secara online saya tidak tau alurnya bagaimana sehingga aduan akan kami sampaikan kepada RT/RW
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i>	Nilai	Bagaimana pengaruh nilai-nilai terhadap kelancaran penanggulangan banjir antar <i>stakeholders</i> ?	Informan 2: Pada pelaksanaan penanggulangan banjir tentunya DPU melaksanakan sesuai dengan aturan kode etik. Agar terjadi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan terutama saat terjadinya bencana
		Kepercayaan	Bagaimana pengaruh kepercayaan antar <i>stakeholders</i> dalam penanggulangan bencana banjir?	Informan 6: Saya percaya terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir, karena memang intensitas banjir di daerah saya menjadi berkurang. Hal itu karena dahulu ketika hujan, akan langsung banjir di depan jalan. Kemudian di depan rumah juga sudah dilakukan peninggian jalan
		Kebijakan	Apakah <i>stakeholders</i> berperan sesuai dengan kebijakan penanggulangan bencana?	Informan 1: Kebijakan penanggulangan bencana ada, bisa dilihat nanti. BPBD
		Komunikasi	Apakah terdapat permasalahan komunikasi antar <i>stakeholders</i> dalam penanggulangan bencana banjir?	Informan 1: Koordinasi terus dilaksanakan dengan beberapa instansi terkait. Namun dalam upaya koordinasi, setiap instansi memiliki SOP tersendiri sehingga terkadang terbentur dengan kepentingan masing-masing

				Informan 3: Penanggulangan banjir harus berkoordinasi dengan pihak lainnya. Tetapi tentu saja terdapat beberapa permasalahan dalam melaksanakan kegiatan, salah satunya yaitu komunikasi yang tidak optimal. Peyaluran informasi dari satu bidang ke bidang lainnya masih terdapat kesalahan informasi
--	--	--	--	---

Lampiran 3: Hasil Dokumentasi



Wawancara dengan Badan penanggulangan bencana Daerah kota Semarang



Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang



Wawancara dengan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang



Wawancara dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana



Wawancara dengan Warga Kota Semarang



Wawancara dengan Kelurahan Tanjung Mas

Lampiran 4: Surat Penelitian



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Brigjend Sudiarto Km. 11(Komplek Terminal Penggaron Kota Semarang)
Telp. 024 - 6730252, 024 - 6730356, 024 - 6730326 Fax. 024 - 67302

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : B /891/800/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF WIDI FATONI, SH. MH.
NIP : 198306032011011009
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKA UTAMI INDRA
NIM : 14020119120031
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Universitas Diponegoro Semarang

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk kegiatan tugas akhir dengan Judul Analisis Peran *Stakeholder* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang. Adapun selama melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terhitung dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 5 Mei 2023, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Semarang, 7 September 2023

AN. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ARIF WIDI FATONI, SH. MH.